

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku "Pendidikan Luar Sekolah" ini. Buku yang hadir di tengah-tengah para pembaca ini merupakan wujud sumbangsih pemikiran penulis untuk dunia pendidikan khususnya tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Pendidikan luar sekolah merupakan suatu usaha kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing. Dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan Indonesia, pendidikan luar sekolah memegang peranan yang sangat strategis di luar pendidikan formal.

Pendidikan luar sekolah sudah tumbuh di tengah masyarakat Bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan, namun pengakuan secara yuridis formal terhadap keberadaan pendidikan luar sekolah setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini terkandung niat mulia untuk memberikan pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya dan lingkungan.

Peran pendidikan luar sekolah dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa dengan cara memberi perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung pendidikannya. Pendidikan luar sekolah hadir untuk memberikan pembelajaran untuk mereka yang tidak dibelajarkan oleh sistem persekolahan yang ada. Pendidikan luar sekolah hadir bukan untuk menyaingi sistem pendidikan formal tetapi untuk mendukung sistem pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah hadir dengan berbagai bentuk dan sistem pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan belajar pada pendidikan formal, serta bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan formal tetapi masih memerlukan tambahan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak diperoleh pada jalur pendidikan formal.

Buku ini penulis tulis didasari oleh banyak tumbuh dan berkembang pendidikan luar sekolah namun masih banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan fungsi pendidikan luar sekolah, ini dikarenakan minimnya literatur dan informasi tentang pendidikan luar sekolah.

Semoga tulisan ringan ini dapat dijadikan referensi untuk para Dosen, Guru, Mahasiswa, pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan non formal ini dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan luar sekolah

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I, M.Pd.I
Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I, M.Pd.I.

Hadion Wijoyo, S.E., S.H., S.Sos., S.Pd., M.H., M.M., Ak., CA., QWP®

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Editor : Prof Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.



PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I, M.Pd.I.

Hadion Wijoyo, S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA.,QWP®



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Penulis:

Dr (C). Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I.
Hadion Wijoyo, S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA.,QWP®

Editor:

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd.

ISBN : 978-623-93873-7-2

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com

Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku ini penulis persembahkan untuk para Dosen, Guru, tenaga kependidikan, pemerintah selaku pengambil kebijakan, para mahasiswa dan para masyarakat yang peduli akan pendidikan khususnya tentang pendidikan luar sekolah (PLS).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Pendidikan Luar Sekolah ini. Buku yang hadir di tengah-tengah para pembaca ini merupakan wujud sumbangsih pemikiran penulis untuk dunia pendidikan khususnya tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Pendidikan luar sekolah merupakan suatu usaha kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan daya saing. Dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan Indonesia, pendidikan luar sekolah memegang peranan yang sangat strategis di luar pendidikan formal.

Pendidikan luar sekolah sudah tumbuh di tengah masyarakat Bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan, namun pengakuan secara yuridis formal terhadap keberadaan pendidikan luar sekolah setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini terkandung niat mulia untuk memberikan pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya dan lingkungan.

Peran pendidikan luar sekolah dalam sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa dengan cara memberi perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung pendidikannya. Pendidikan luar sekolah hadir untuk memberikan pembelajaran untuk mereka yang tidak dibelajarkan oleh sistem persekolahan yang ada. Pendidikan luar sekolah hadir bukan untuk menyaingi system pendidikan formal tetapi untuk mendukung sistem pendidikan formal. Pendidikan luar sekolah hadir dengan berbagai bentuk dan sistem pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan belajar pada pendidikan formal, serta bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan formal tetapi masih memerlukan tambahan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang tidak diperoleh pada jalur pendidikan formal.

Buku ini penulis tulis didasari oleh banyak tumbuh dan berkembang pendidikan luar sekolah namun masih banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan fungsi pendidikan luar sekolah, ini dikarenakan minimnya literatur dan informasi tentang pendidikan luar sekolah.

Semoga tulisan ringan ini dapat dijadikan referensi untuk para Dosen, Guru, Mahasiswa, pemerhati pendidikan dalam mengembangkan dunia pendidikan non formal ini dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan luar sekolah

Riau, 21 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I.	
LATAR BELAKANG LAHIRNYA PENDIDIKAN LUAR	
SEKOLAH (PLS)	1
A. Dasar Pemikiran PLS	1
B. Dasar Hukum PLS	4
C. Pengertian PLS	6
D. Bentuk Keaguan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).....	11
E. Fungsi PLS	13
F. Perkembangan PLS	15
BAB II. PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP	17
A. Pendidikan Seumur Hidup	17
B. Implementasi Konsep Pendidikan Seumur Hidup	26
C. Strategi Pendidikan Seumur Hidup	28
BAB III.	
PRINSIP, SASARAN, KEGIATAN PENDIDIKAN LUAR	
SEKOLAH (PLS)	30
A. Prinsip-Prinsip PLS	30
B. Sasaran PLS	32
C. Kegiatan PLS	37
BAB IV.	
PENDIDIKAN INFORMAL, FORMAL DAN NON FORMAL 43	
A. Latar Belakang Pendidikan Formal dan Non Formal ..	43
B. Hubungan Pendidikan Informal, Formal, dan Non Formal	45
BAB V.	
CIRI DAN KEGIATAN SISTEM PENDIDIKAN LUAR	
SEKOLAH (PLS)	
A. Pendidikan Informal	51
B. Pendidikan Non Formal	54

BAB VI.	
BENTUK-BENTUK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) ..	57
A. Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP).....	57
B. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	60
C. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65
D. Pendidikan dalam Keluarga	70
E. Hubungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dengan Prestasi Belajar	78
BAB VII	
MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	80
A. Mutu Pendidikan Non Formal (PNF).....	80
B. Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF).....	82
C. Indikator Atau Penilaian Mutu Pendidikan Non Formal (PNF).....	83
BAB VIII	
KEBIJAKAN AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL..	86
A. Pengertian Akreditasi PNF	86
B. Tujuan Dan Manfaat Akreditasi PNF	88
C. Fungsi Akreditasi PNF	89
D. Prinsip Akreditasi PNF	90
E. Peran Akreditasi Dalam Mutu PNF	91
DAFTAR PUSTAKA	95
RIWAYAT HIDUP PENULIS	98
RIWAYAT HIDUP EDITOR	103

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BAB I

LATAR BELAKANG LAHIRNYA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

A. Dasar Pemikiran Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan adalah kegiatan untuk menjadikan manusia muda menjadi manusia yang memiliki ilmu penguatan menuju pendewasaan manusia.. Dalam pendidikan terjadi pembinaan terhadap perkembangan potensi peserta didik untuk memenuhi kelangsungan hidupnya secara pribadi dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik yang cerdas melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan untuk mengisi peranan tertentu di kemudian hari.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum butir kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa, makna dari kalimat tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan menjadi instrumen untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang cerdas. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 13, memuat jalur pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal memiliki tujuan utama pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa bertanggung jawab.

Pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Proses belajar itu akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual

dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan. Proses perubahan (belajar) dapat terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja.¹

Dari kacamata sejarah, alasan diselenggarakannya PLS yaitu:

1. Aspek pelestarian budaya

Pendidikan yang pertama terjadi dan berlangsung adalah pendidikan di lingkungan keluarga. sehingga pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak, atau antar anak dengan anak yang akan transfer pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan dan pembimbingan yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun temurun yang meliputi kemampuan, cara kerja dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Walaupun sistem pendidikan yang berlaku di dalam keluarga berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di sekolah namun kegiatan belajar inilah yang mendasari lahirnya pendidikan luar sekolah.

2. Aspek teoritis

Mengacu kepada teori yang diketengahkan Philip H. Coombs (1973:10), tidak satupun lembaga pendidikan: formal, informal maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori tersebut dapat dikatakan bahwa, keberadaan pendidikan tidak hanya

¹ Faisal Sanapia, *Pendidikan Luar Sekolah*. (CV. Usaha Nasional, Surabaya : 2001), Hlm 64

penting bagi segelintir masyarakat tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Dasar pijakan

Ada tiga dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu: UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 dan peraturan pemerintah RI No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Berdasarkan dasar pijakan tersebut dapat dikemukakan bahwa, PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun dari dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Adapun Bentuk-bentuk satuan PLS sebagaimana diundangkan di dalam UUSPN tahun 1989 pasal 9:3 meliputi: pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis. Satuan PLS sejenis dapat dibentuk kelompok bermain, penitipan anak, padepokan persilatan dan pondok pesantren tradisional.

4. Aspek kebutuhan terhadap pendidikan

Kesadaran masyarakat akan pentingnya semakin meluas, tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan juga masyarakat yang berada daerah pedesaan bahkan daerah terisolir sekalipun. Kesadaran ini didasari oleh perkembangan ekonomi, IPTEK, politik, sadar akan kebodohan, keterbelakangan atau kekalahan dari kompetisi menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu, sehingga dibentuklah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat sekolah maupun di luar sekolah.

5. Keterbatasan lembaga pendidikan sekolah

Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku

serta berbagai keterbatasan lainnya. Akibat dari kekurangan maupun keterbatasan tersebut memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat informal atau nonformal diselenggarakan, dengan harapan pendidikan masyarakat tersebut dapat terpenuhi.

B. Dasar Hukum Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah tidaklah sama. Unesco (1972) menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah mempunyai derajat keketatan dan keseragaman yang lebih rendah dibanding dengan tingkat keketatan dan keseragaman pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, sedangkan pendidikan sekolah pada umumnya memiliki bentuk dan isi program yang seragam untuk setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan. Perbedaan inipun tampak pada teknik-teknik yang digunakan dalam merencanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil program pendidikan. Tujuan program pendidikan luar sekolah tidak seragam, sedangkan tujuan pendidikan sekolah seragam untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan. Peserta didik (warga belajar) dalam program pendidikan luar sekolah tidak memiliki persyaratan ketat sebagaimana persyaratan yang berlaku bagi siswa pendidikan sekolah.²

Berkaitan dengan pengertian pendidikan terdapat perbedaan yang jelas antara pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Sehubungan dengan hal ini Coombs (1973) membedakan pengertian ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut:

1. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan

² Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan*. (CV. Remaja Karya, Bandung : 1985), Hlm 47

professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

2. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.
3. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang , dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.³

Landasan hukum pendidikan luar sekolah (PLS):

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

³ M. Kamil. *Pendidikan Non Formal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (sebuah Pembelajaran dari Komikan Jepang*. (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009). Hlm. 70.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Komitmen Internasional:
 - a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang Pendidikan Orang Dewasa atau CONFINTEA V, *Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future*.
 - b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All).
 - c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDG's).
 - d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (*United Nations Decade of Education for Sustainable Development*) 2004-2014.

C. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.⁴

Berikut ini pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi PLS.

1. P.H. Coombs menyatakan bahwa PLS adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis dan dilaksanakan di luar system pendidikan formal, diakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada sasaran didik dalam mencapai tujuan belajarnya (Joesoef,2008:50).

⁴ Nanang Purwanto, *Ilmu Pendidikan*. (Bandung: CV. Remaja Karya, 1985) hl. 36

2. Kindervetter mengemukakan bahwa PLS sebagai suatu metode penerapan kebutuhan, minat orang dewasa dan pemudah putus sekolah di Negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup (Anshori,2010:5).
3. Menurut Komunikasi Pembaharuan Nasional Pendidikan dalam Joesoef (2010: 50) bahwa PLS adalah setiap kesempatan yang ditandai dengan adanya komunikasi yang tertur dan terarah, diluar sekolah dengan tujuan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, untuk mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.⁵

Berdasarkan sejarah perkembangan dan banyaknya aktivitas yang dilaksanakan menurut Joesoef (2008: 54-56) PLS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Macam bentuk PLS tergantung macam bentuk pendidikan.
2. Keterbatasan PLS yang dipandang sebagai pendidikan formal dan dipandang sebagai pelengkap bentuk-bentuk pendidikan formal.
3. Tanggung jawab penyelenggaraan PLS dibagi oleh pengawasan umum/ masyarakat, pengawasan pribadi atau kombinasi keduanya.
4. Beberapa lembaga PLS didisiplinkan secara ketat terkait hal waktu pengajaran, teknologi modern, kelengkapan dan buku-buku bacaan.
5. Metode pengajaran bermacam-macam dari tatap muka atau guru dan kelompok-kelompok belajar sampai penggunaan

⁵ Nanang Purwanto. *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 20014. Hlm. 89.

audio televisive, unit latihan keliling, demonstrasi, kursus-kursus, korespondensi, alat-alat bantu visual.

6. Penekanan pada PLS terkait penyebaran program teori dan praktek secara relative.
7. Tingkat/ jenjang sistem PLS terbatas pada *kredensial*, yaitu proses pembentukan kualifikasi profesional yang berlisensi, yang diberikan kepada anggota atau organisasi, dengan menilai latar belakang dan legitimasi.
8. Guru-guru dilatih secara khusus untuk tugas tertentu atau hanya mempunyai kualifikasi profesional dan tetap bukan termasuk identitas guru.
9. Pencatatan terkait pemasukan murid, guru dan kredensial pimpinan, kesuksesan latihan; dan pengaruh PLS terhadap peningkatan produksi ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan peserta.
10. Pemantapan bentuk PLS mempunyai dampak pada produksi ekonomi dan perubahan sosial dalam waktu singkat dari pada kasus pendidikan formal sekolah.
11. Sebagian besar program PLS dilaksanakan oleh remaja dan orang-orang dewasa secara terbatas pada kehidupan dan pekerjaan.
12. Peranan PLS mencakup pengetahuan, keterampilan dan pengaruh pada nilai-nilai program dalam rangka menuju pembangunan nasional.⁶

Berdasarkan ciri-ciri dan klasifikasi PLS, maka sasaran PLS tidak mudah ditetapkan seperti pendidikan sekolah, menurut Joesoef (2008: 58-59), sasaran PLS secara garis besar dibagi menjadi 2 sasaran pokok, yaitu:

1. PLS *untuk pemuda*. Alasan pemuda dijadikan sasaran untuk PLS antara lain:
 - a. Banyak pemuda tidak memperoleh pendidikan sekolah yang cukup, lebih-lebih di Negara berkembang;
 - b. Pemuda memperoleh pendidikan yang tradisional;

⁶ Nanang Purwanto. Pengantar Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Hlm. 39-40

- c. Pemuda memperoleh latihan kecakapan khusus melalui pola-pola pergaulan;
 - d. Pemuda dituntut mempelajari norma-norma dan tanggung jawab sebagai sanksi dari masyarakatnya. Kelompok-kelompok kegiatan PLS antara lain: klub pemuda, klub pemuda tani dan pergaulan.
2. PLS untuk orang dewasa. Alasan orang dewasa dijadikan sebagai sasaran PLS antara lain:
- a. Orang-orang dewasa tertarik terhadap profesi kerja;
 - b. Orang-orang dewasa tertarik terhadap keahlian. Beberapa bentuk program PLS yang ditawarkan untuk orang dewasa antara lain: kursus-kursus pendek, pelayanan/ latihan, dan surat menyurat.⁷

Mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah dalam Joesoef (2008: 59-62) maka sasaran PLS mencakup:

1. Ditinjau dari segi sasaran pelayanan, berupa:
 - a. Usia pra sekolah (0-6 tahun), PLS diselenggarakan dengan tujuan mempersiapkan anak-anak menjelang masuk ke pendidikan formal;
 - b. Usia pendidikan dasar (7-12 tahun), PLS menyelenggarakan program kejar paket A dan kepramukaan;
 - c. Usia pendidikan menengah (13-18 tahun), PLS sebagai pengganti pendidikan, pelengkap dan sebagai penambah program pendidikan;
 - d. Usia pendidikan tinggi (19-24 tahun), tujuannya dalam hal menyiapkan mereka untuk bekerja melalui pemberian berbagai ketrampilan.
2. Ditinjau dari jenis kelamin, sasaran PLS ditujukan pada kaum wanita karena jumlah mereka banyak dan partisipasinya yang kurang (produktivitas dan efisiensi kerja). Program-program PLS yang ditawarkan antara lain: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (pkk), Program

⁷Nanang Purwanto. *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Hlm. 40

Keluarga Berencana, Program Peningkatan Gizi Keluarga, perawatan bayi, pengetahuan rumah dan penjagaan lingkungan sehat.

3. Berdasarkan lingkungan sosial budaya, sasaran PLS dapat berupa:
 - a. Masyarakat pedesaan, program PLS terkait dengan mata pencaharian dan pendayagunaan sumber-sumber alam;
 - b. Masyarakat perkotaan, program PLS berupa pemberian informasi dan kursus terkait dengan kemajuan iptek
 - c. Masyarakat terpencil, program PLS berupa pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang perkembangan nasional.
4. Berdasarkan kekhususan sasaran pelajaran, sasaran PLS mencakup:
 - a. Peserta didik yang digolongkan terlantar seperti anak yatim piatu;
 - b. Peserta didik yang mengalami pengembangan sosial dan emosional seperti anak nakal, korban narkoba dan wanita tuna susila;
 - c. Peserta yang mengalami cacat mental dan cacat tumbuh seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna mental;
 - d. Peserta didik yang bermasalah karena berbagai sebab sosial.
5. Berdasarkan pranata, sasaran dari PLS antara lain :
 - a. Pendidikan keluarga, mengembangkan peserta didik untuk ketaqwaan kepada Tuhan, nilai moral, pandangan dan sikap hidup, ketrampilan dan kreativitas;
 - b. Pendidikan perluasan wawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir, menambah pengetahuan, dan memperluas cakrawala tentang kehidupan berbangsa dan berkeluarga;
 - c. Pendidikan keterampilan dalam rangka mengembangkan profesionalisme pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang/ jasa guna meningkatkan taraf hidup.

6. Berdasarkan sistem pengajaran, sasaran PLS mencakup:
 - a. Kelompok, organisasi dan lembaga;
 - b. Mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan;
 - c. Kesenian teradisional seperti wayang , ludruk ataupun teknologi modern seperti televise, radio, film dan sebagainya;
 - d. Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah dan alat-alat perlengkapan kerja.
7. Berdasarkan segi pelebngaan program, sasaran PLS antara lain:
 - a. Program antar sector dan swadaya masyarakat seperti PKK, Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN), DAN Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS);
 - b. Koordinasi perencanaan desa atau pelaksanaan program pembangunan;
 - c. Tenaga pengarahan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa.⁸

D. Bentuk Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Menurut Anshori (2010: 18-20), bentuk-bentuk pelaksanaan PLS yang utama antara lain: (a) belajar kelompok; (b) magang; (c) latihan-latihan ketrampilan; (d) lain-lain. Berikut ini penjelasan mengenai bentuk-bentuk PLS tersebut:

1. Belajar kelompok

Kelompok adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan status dan peranannya. Kelompok bukanlah sekedar kumpulan orang-orang, tetapi anggota kelompok mengadakan interaksi satu sama lain dan mempunyai tujuan yang memberi haluan dan arah gerak kelompok maupun anggota kelompok agar tercapai tujuannya. Dalam belajar kelompok, pengalaman

⁸ Nanang Purwanto. *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Hlm. 41-42

belajar tidak hanya diperoleh dan berasal dari sumber belajar, melainkan terdapat pula melalui interaksi kelompok antar peserta didik itu sendiri. Kegiatan belajar kelompok adalah terjalinnya interaksi antara sumber belajar dengan warga belajar secara efektif.

2. Magang

Menurut Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Lembang Bandung dalam Anshori, (2010:19) magang adalah proses belajar dimana seseorang memperoleh dan menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam bidangnya. PLS melalui magang ini diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang sangat dibutuhkan pasar kerja, sebab kurikulum maupun sasaran pendidikan formal yang digunakan umumnya sudah ketinggalan atau tak mampu mengikuti derap dunia usaha dan industri yang berkembang sangat pesat dan cepat berubah.

3. Latihan keterampilan

Latihan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan mental, keuletan, disiplin dan lain-lain yang kesemuanya itu harus diperaktekkan secara kongkret di dalam kehidupan masyarakat. Latihan keterampilan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu cara sistematis yang diberikan, kepada seorang untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Roberts (1937) membagi latihan keterampilan kedalam dua macam latihan berdasarkan jenisnya yaitu: 1) latihan keterampilan prajabatan untuk menyiapkan calon pekerja dalam menghadapi suatu jenis pekerjaan tertentu dan; 2) latihan keterampilan tambahan bagi mereka yang sudah bekerja dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan efisiensi kerja.

E. Fungsi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan luar sekolah memiliki fungsi dalam kaitan dengan kegiatan pendidikan sekolah, kaitan dengan dunia kerja dan kehidupan. Dalam kaitan dengan pendidikan sekolah, fungsi PLS adalah sebagai substitusi, komplemen, dan suplemen. Kaitannya dengan dunia kerja, PLS mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Sedangkan dalam kaitan dengan kehidupan, PLS berfungsi sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang.⁹

1. Fungsi PLS sebagai substitusi pendidikan sekolah

Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa PLS sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Contoh: pendidikan kesetaraan yaitu Paket A setara SD untuk anak usia 7-17 tahun, Paket B setara SLTP bagi anak usia 13-15 tahun, dan Paket C setara SLTA bagi remaja usia SLTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara SD, SLTP dan SLTA.

2. Fungsi PLS sebagai komplemen pendidikan sekolah

Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada PLS. Pertama, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, jalur PLS merupakan wahana paling tepat untuk mengisi kebutuhan mereka. Kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak biasa diajarkan di sekolah. Misalnya olah raga prestasi, belajar

⁹ Sudjana. *Pendidikan luar sekolah*, (Bandung : Fallah production 2001), hl 30.

bahasa asing di SD, dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar macam itu PLS merupakan saluran yang tepat. Bentuk-bentuk PLS yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah dapat berupa kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstra kurikuler (pramuka, latihan drama, seni suara, PMR) atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga PLS yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk kursus, kelompok belajar dan sebagainya.

3. Fungsi PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah

Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Sasaran populasi PLS sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda atau orang dewasa, yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu (SD sampai PT). Mengapa mereka membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap tertentu sebagai tambahan pendidikan yang tidak diperoleh di sekolah? Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga kurikulum sekolah sering ketinggalan. Oleh karena itu, lulusan pendidikan sekolah perlu menyesuaikan pengetahuan dan keterampilannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Hal itu dapat ditempuh dengan melakukannya melalui PLS. Kedua, pada umumnya lulusan pendidikan sekolah belum sepenuhnya siap terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, lulusan tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diminta oleh dunia kerja melalui PLS. Ketiga, proses belajar itu sendiri berlangsung seumur hidup. Walaupun telah menamatkan pendidikan sekolah sampai jenjang tertinggi, seseorang masih perlu belajar untuk tetap menyelaraskan hidupnya dengan perkembangan dan tuntutan lingkungannya.

4. Fungsi PLS sebagai jembatan memasuki dunia kerja

Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai suplemen bagi lulusan pendidikan sekolah untuk memasuki dunia kerja. Lepas kaitannya dengan pendidikan sekolah, PLS berfungsi sebagai jembatan bagi seseorang memasuki dunia kerja. Apakah orang tersebut memiliki iazah pendidikan sekolah atau tidak. Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keaksaraannya di jalur PLS dan ia belum memiliki pekerjaan, dia memerlukan jenis pendidikan luar sekolah yang bisa membawa ke dunia pekerjaan.

5. Fungsi PLS sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan

Bertahan hidup (survival) harus melalui pembelajaran. Tidaklah mungkin seseorang bisa mempertahankan hidupnya tanpa belajar mempertahankan hidup. Demikian pula untuk mengembangkan mutu kehidupannya, seseorang harus melakukan proses pembelajaran. Belajar sepanjang hayat merupakan wujud pertahanan hidup dan pengembangan kehidupan. Pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan dan belajar sepanjang hayat yang amat strategis untuk pengembangan kehidupan seseorang.

F. Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan salah satu jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal yang bukan pendidikan formal dan informal.¹⁰ PLS ada sebagai penunjang pendidikan formal yang sudah terselenggara yang dirasa belum mampu secara maksimal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan ril dunia kerja dan kehidupan sosial masyarakat selama ini.

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 26 ayat (1) dijelaskan

¹⁰ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 13 ayat (1)

bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sementara di ayat (3), disebutkan bahwa, pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada ayat (4) menjelaskan bahwa, pelaksanaan satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

PLS mempunyai peranan untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah tentang pendidikan. PLS merupakan sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan sekolah. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah ;PLS dapat menyajikan beberapa mata pelajaran atau kegiatan pelajar yang belum termuat dalam kurikulum pendidikan sekolah, sedangkan materi pelajaran atau kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat yang menjadi layanan sekolah. Sebagai penambah pendidikan sekolah; PLS dapat memberi kesempatan tambahan, pengalaman belajar dalam mata pelajaran yang sama yang ditempuh sekolah kepada mereka yang masih bersekolah atau mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah, Sebagai pengganti pendidikan sekolah; PLS dapat menggantikan fungsi sekolah di daerah-daerah yang karena berbagai alasan, penduduknya belum terjangkau oleh pendidikan sekolah.

BAB II

PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

A. Pendidikan Seumur Hidup

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah satu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akaliah dan perasaan terhadap alam dan manusia.¹¹ Pendidikan merupakan proses abadi bagi menyesuaikan perkembangan diri manusia yang merangkumi aspek jasmani, alam, akliah, kebebasan dan perasaan manusia terhadap Tuhan sebagaimana yang ternyata dalam akliah, persamaan dan kemauan manusia.¹² Pendidikan ialah mempersiapkan manusia supaya dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna.¹³

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan terkait erat dengan proses pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas,

¹¹ Lihat Abdul Halim el-Muhammady, Januari 1984. *Pendidikan Islam Skop Dan Matlamatnya*, Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor, hlm. 10 dan lihat juga John Dewey, 1910. *Democracy and Education*, Mac Millan & Co., New York, hlm. 1-2).

¹² Hermen Harrel Horne, 1939. *The Democratic Philosophy of Education*, Mac Millan & Co., New York, hlm. 6

¹³ Herbert Spencer, 1906. *Education: Intellectual, Moral and Physical*, William and Nongete, hlm. 84

dan pembangunan di bidang ekonomi yang menunjang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.¹⁴

Menurut Crow *Modern educational theory and practise not only are aimed at preparation for future living but also are preparative in determining the patern of present, day-day attitude and behavior.* Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya.¹⁵

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pembinaan akal manusia yang merupakan potensi utama dari manusia sebagai makhluk berfikir. Dengan pembinaan olah piker, manusii diharapkan semakin meningkat kecerdasannya dan meningkat pula kedewasaan berfikirnya, terutama memiliki kecerdasan dalam memecahkan permasalahan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang di serahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinue, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Adapun tujuan Pendidikan akan menentukan kearah mana anak didik akan dibawa. Disamping itu pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia.¹⁶

¹⁴ Oemar Hamalik. *Tekhnologi Pendidikan.* Bandung: Yayasan Partisipasi Pembangunan Indonesia Biro Penulisan Buku. 2000. hlm. 1

¹⁵ Fatah Syukur NC. *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah.* Semarang : Pustaka Rizki Putra,. 2011. hlm. 11

¹⁶ Redja Mudyahardja. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2001)

Pendidikan pada hakikatnya adalah pelatihan keterampilan setelah manusia memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dari hasil olah pikirnya. Keterampilan yang dimaksudkan adalah suatu objek tertentu yang membantu kehidupan manusia karena dengan keterampilan tersebut, manusia mencari rezeki dan mempertahankan kehidupannya. Pendidikan dilakukan dilembaga formal dan non formal, sebagaimana dilaksanakan disekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan bertujuan mewujudkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi dengan indikator utama adanya peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat, etika dan moral masyarakat yang baik dan berwibawa, serta terbentuknya kepribadian yang luhur.¹⁷

Bila diperhatikan dalam sejarah pertumbuhan suatu masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan generasi sejalan dengan tuntutan masyarakat. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung maju mundurnya pendidikan.¹⁸ Sehingga dunia pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa yang selaras dan seimbang dengan tuntutan zaman. Sekolah merupakan sebuah lembaga formal untuk mencetak generasi bangsa yang berpendidikan. Tujuan pendidikan pada suatu bangsa yaitu mengusahakan supaya setiap pribadi warga Negara memiliki kesempurnaan pertumbuhan tubuhnya, sehat otaknya, baik budi pekertinya dan sebagainya. Pada gilirannya seseorang akan mencapai tingkat kesempurnaan pribadi, bahagia lahir dan bathin melalui pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.¹⁹

¹⁷ Hasan Basri. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009. hlm. 56

¹⁸ Sudirman. *Ilmu Pendidikan*: Rosda Karya. Bandung. 1991. hlm. 3

¹⁹ Syafaruddin. *Ilmu Pendidikan: Perspektif Baru Rekonstruksi*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2005. hlm. 55

Pendidikan itu sebagai menambah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada individu dalam masyarakat. Proses pemindahan nilai budaya itu ialah, pertama, pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran. Ia boleh diartikan sebagai pemindahan pengetahuan atau knowledge. Kedua proses pendidikan merupakan satu latihan. Pendidikan adalah lembaga dan usaha pembangunan bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang lingkup yang amat komprehensif, yakni pendidikan kemampuan mental pikir (rasio, intelek) kepribadian manusia seutuhnya. Untuk membina kepribadian, demikian jelas memerlukan rintangan waktu yang relatif panjang bahkan berlangsung seumur hidup.²⁰

2. Pendidikan Seumur Hidup

Pendidikan Seumur Hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.²¹ Menurut UU SISDIKNAS no. 20 tahun 2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan seumur hidup bertujuan untuk menghapuskan peranan sekolah sebagai alat untuk mengekalkan ketidakadilan.²²

Belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi perolema dan terdorong tinggi sekali

²⁰ Tholib Kasan, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta, Studio Press 2009 hal.

²¹ Binti Maunah. *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: PT Sukses Offset, 2009) hal 1.

²² Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

untuk belajar di seluruh tingkat usia, dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru.²³

Tujuan dari pendidikan seumur hidup yakni:

- a. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan urodad dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin.
- b. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis maka pendidikan sewajarnya berlangsung selama manusia hidup.²⁴

3. Konsep Pendidikan Seumur Hidup

Konsep pendidikan seumur hidup pada mulanya dikemukakan oleh filosof dan pendidik Amerika yang sangat terkenal yaitu *John Dewey*. Kemudian dipopulerkan oleh *Paul Langrend* melalui bukunya: *An Introduction to Life Long Education*. Menurut *John Dewey*, pendidikan itu menyatu dengan hidup. Oleh karena itu pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir.

Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu proses kontinyu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal maupun formal baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup baru mulai dimasyarakatkan melalui kebijaksanaan Negara (TAP MPR NO. IV / MPR / 1973 jo. TAP NO. IV / MPR / 1978 tentang GBHN) yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional berikut ini:

²³ Wayan Ardhana. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Malang:FIP IKIP Malang,1986)

²⁴ Tim Dosen FKIP IKIP Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional .1988. hal. 139 – 140

- a. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.
- b. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam GBHN 1978 dinyatakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.²⁵ Ini memberikan pemahaman bahwa, pendidikan seumur hidup dimulai sejak dari lahir hingga meninggal dunia. Yang mana pendidikan awal dan utama anak diperoleh dari dalam lingkungan keluarga. Sehingga orang tua memiliki peran yang cukup urgen terhadap peletakan dasar pendidikan anak.

Secara yuridis format konsep pendidikan seumur hidup dituangkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 jo Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, dengan prinsip-prinsip:

- a. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia (arah pembangunan jangka panjang).
- b. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.²⁶

²⁵ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),hal.40

²⁶ Burhannuddin Salam,*Pengantar Pedagogik*,(Jakarta:Rineka Cipta,2002),cet. I, hal.205

Philip H. Coombs mengklasifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian, yaitu pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan), pendidikan formal (pendidikan sekolah) dan pendidikan non-formal (pendidikan luar sekolah yang dilembagakan).²⁷

a. Pendidikan Luar Sekolah yang Tidak Dilembagakan

Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang lahir sampai mati, seperti di dalam keluarga, tetangga, pekerjaan, hiburan, pasar, atau di dalam pergaulan sehari-hari.

b. *Pendidikan sekolah*

Pendidikan sekolah adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang yang di bagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

c. Pendidikan Luar Sekolah yang Dilembagakan

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan berencana di luar kegiatan persekolahan.

4. Urgensi Pendidikan Seumur Hidup

Fuad Ihsan (1996:44-45) dalam buku Dasar-dasar Kependidikan, menulis beberapa dasar pemikiran ditinjau dari beberapa aspek tentang urgensi pendidikan seumur hidup, antara lain:

- a. Aspek ideologis, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan menambah keterampilannya. Pendidikan seumur hidup akan

²⁷ Hasbullah...,hal.41

membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya.²⁸

- b. Aspek ekonomis, pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk dapat keluar dari “Lingkungan Setan Kemelaratan” akibat kebodohan. Pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya, hidup di lingkungan yang menyenangkan-sehat dan memiliki motivasi dalam mendidik anak-anak secara tepat sehingga pendidikan keluarga menjadi penting.
- c. Aspek sosiologis, di negara berkembang banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya, ada yang putus sekolah bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Pendidikan seumur hidup bagi orang tua merupakan problem solving terhadap fenomena tersebut. Aspek politis, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat untuk memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak-hak pada negara demokrasi.
- d. Aspek teknologis, pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana, teknisi dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan negara-negara maju. Aspek politis, dan pedagogis, sejalan dengan makin luas, dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar

²⁸ http://my.opera.com./arjuna_kabel/blog/2008/01/04/pendidikan-seumur-hidup

sepanjang hidup perlu diciptakan suasana yang kondusif.

5. Landasan Pendidikan Seumur Hidup

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, tentang GBHN, menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional (pembangunan bangsa dan watak bangsa), antara lain: Arah pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Bab IV bagian pendidikan, GBHN menetapkan pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Di samping dasar (landasan), yuridis konstitusional (kenegaraan : GBHN), pendidikan manusia seutuhnya ini sesuai pula dengan konsepsi atau teori kejiwaan manusia menurut teori kepribadian dan psikologi Gestalt.

Teori ilmu jiwa mengajarkan bahwa kepribadian manusia merupakan satu kebulatan antara potensi-potensi lahir batin bahkan juga jasmani dan penampilannya, antara lain seperti dikatakan oleh **Garrett**: *in fact, their definition of personality not only includes an individual's characteristic ways of conducting himself in everyday situations but stresses as well such conditioning factors as physique, appearance, intelligence, aptitudes, and character traits. All these contribute, although in varying degree, to a person's total vality that is, to the imprresoin whirch he makes on other people.*²⁹

²⁹ Tholib Hasan, *Pendidikan Seumur Hidup (Dasar-Dasar Kependidikan)*, Jakarta, Studio Press. 2009 hal. 59

B. Implikasi Konsep Pendidikan Seumur Hidup

Ilmu pendidikan, dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut: Implikasi pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh ananda W. P. Guruge dalam bukunya *To Ward Better Education Managemen*, dalam buku dasar-dasar :

1. Pendidikan baca tulis fungsional.

Memang sulit untuk membuktikan peranan *melek uiruf fungsional*, terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, namun pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan rakyat jelata, misalnya para petani, disebabkan oleh karena pengetahuan-pengetahuan baru pada mereka. Pengetahuan baru itu dapat diperoleh terutama melalui bahan bacaan.

2. Pendidikan vokasional.

Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan diluar sekolah bagi anak diluar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non formal, sebab itu program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai. Dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meluasnya industrialisasi, menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinue

3. Pendidikan profesional.

Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam kiat-kiat profesi telah tercipta *Built in Mechanism* yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh, berlaku pula bagi professional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar.

4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan

Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan IPTEK, telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat, dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik, sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinue (lifelong education). Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari azas pendidikan seumur hidup.

5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik

Disamping tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dalam kondisi sekarang dimana pola pikir masyarakat. Yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa, maupun pemimpin pemerintahan di Negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga Negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinue dalam konteks ini merupakan konsekuensinya.

6. Pendidikan cultural dan pengisian waktu senggang

Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep long life education. Dengan cara ini waktu senggang dapat dimanfaatkan berbasis budaya yang baik sehingga pendidikan seumur hidup dapat berjalan menyenangkan.³⁰

Hal yang mendasari perlunya pendidikan seumur hidup:

1. Pertimbangan ekonomi. Masih banyaknya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
2. Keadilan. Tuntutan akan adanya persamaan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

³⁰ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. II, hal. 29

3. Faktor peranan keluarga
4. Faktor perubahan peranan sosial
5. Perubahan teknologi
6. Faktor-faktor vocational
7. Kebutuhan anak-anak awal.³¹

C. Strategi Pendidikan Seumur Hidup

Adapun strategi dalam pendidikan seumur hidup meliputi:

1. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan.
2. Konsep Belajar Seumur Hidup. Belajar seumur hidup dimaksudkan orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia, dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru.
3. Kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajaran seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup.
4. Arah Pendidikan Seumur Hidup meliputi:
 - a. Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa

Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan sifat "Self Interest" yang merupakan tuntunan hidup sepanjang masa. Diantaranya adalah kebutuhan akan baca tulis bagi mereka pada umumnya dan latihan keterampilan bagi pekerja.

³¹ Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2001.hal 110

b. Pendidikan seumur hidup bagi anak

Pendidikan seumur hidup bagi anak, merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan oleh karena anak akan menjadi “tempat awal” bagi orang dewasa artinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan kemampuan anak, memberi peluang besar bagi pembangunan pada masa dewasa. Dan pada gilirannya masa dewasanya menanggung beban hidup yang lebih tinggi.³²

³² Sabri Alisu. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1999

BAB III

PRINSIP, SASARAN, KEGIATAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)

A. Prinsip-Prinsip Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Menurut KBBI prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap manusia baik secara sadar atau tidak, sedikit atau banyak, senantiasa melakukan kegiatan belajar di sepanjang usia jaganya. Pada saat melakukan kegiatan belajar, seseorang sebenarnya tengah mendidik diri sendiri. Karena itu inti kegiatan pendidikan pada dasarnya adalah belajar. Kenyataan menunjukkan bahwa semenjak dahulu hingga sekarang, bahkan juga di masa mendatang kegiatan belajar terus menerus terjadi di sepanjang hayat manusia. Kejadian tersebut berlangsung tanpa mengenal batas waktu, tempat, dan pelaku. Dari pemaparan di atas bahwa prinsip dari pendidikan luar sekolah itu adalah: *Lifelong learning* (belajar sepanjang hayat), *Education for all* (Pendidikan untuk semuanya) dan *Lifelong education* (pendidikan berlangsung sepanjang hayat).

Prinsip dasar pertama kegiatan PLS adalah *Lifelong Learning* (belajar sepanjang hayat). Prinsip ini sebetulnya merupakan pokok pikiran yang sesuai dengan hakikat, realitas, dan ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa setiap manusia baik secara sadar atau tidak, sedikit atau banyak, senantiasa melakukan kegiatan belajar di sepanjang usia jaganya. Pada saat melakukan kegiatan belajar, seseorang sebenarnya tengah mendidik diri sendiri. Karena itu inti kegiatan pendidikan pada dasarnya adalah belajar. Kenyataan menunjukkan bahwa semenjak dahulu hingga sekarang, bahkan juga di masa mendatang kegiatan belajar terus menerus terjadi di sepanjang hayat manusia. Kejadian tersebut berlangsung tanpa mengenal batas waktu, tempat, dan pelaku.

Prinsip *Lifelong Learning* memang terlihat lebih berkenaan dengan segi waktu, sedangkan prinsip *Education for All* tampak lebih berkenaan dengan cakupan subyek layanan pendidikan. Namun demikian, keduanya sebetulnya saling melengkapi dan bahkan *Education for All* lebih menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu berarti pendidikan untuk semua orang. Dengan demikian *Education for All* merupakan prinsip yang berdampak lebih membumikan prinsip *Lifelong Learning*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan prinsip PLS dan harus dipegang teguh dalam setiap penyelenggaraan PLS.

Selain istilah *Lifelong Learning* ada juga istilah *Lifelong Education*. Perlu diketengahkan disini bahwa *Lifelong Education* merupakan sebuah istilah yang mula-mula dikemukakan oleh Paul Lengrand pada tahun 1972 dalam sidang Unesco. istilah ini menunjuk ke sebuah pengakuan bahwa pendidikan pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Karena prinsip ini memang menunjukkan realitas yang sama sekali tak dapat disanggah, maka akhirnya prinsip ini diakui oleh semua pendidik, baik kalangan pendidik di jalur PLS sendiri maupun yang di jalur persekolahan (pendidikan formal). Sejak itu terjadilah perubahan paradigma atau pandangan mendasar tentang pendidikan. Pendidikan yang semula sekedar diartikan sebagai upaya menolong atau membawa anak kearah kedewasaan sebagaimana yang diajarkan oleh Langevelt, seorang pakar pendidikan Belanda, berubah menjadi upaya untuk mengem-bangkan potensi manusia.

Dengan prinsip tersebut, maka pendidikan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, baik saat dan tempat terjadinya belajar itu sendiri maupun kesempatan pihak pelaku belajar untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan kata lain, pendidikan bisa terjadi dalam 24 jam dan dilakukan pada usia berapapun dan di tempat manapun. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa layanan pendidikan harus dapat diberikan kapan saja dan di manapun juga, termasuk saat dimulai dan

diakhirinya layanan tersebut beserta lokasinya. Belajar tidak boleh terkendala oleh kekurangtersediaan tempat belajar. Belajar bisa dilakukan di sekolah, rumah, balai desa, masjid, kantor, pertokoan, pasar, stasiun kereta api, bengkel, arena olah raga, kebun, mobil, perahu, ataupun pesawat udara. 33

B. Sasaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Adapun sasaran pendidikan luar sekolah (dalam Joesoef,1992:58) dapat dibagi menjadi 2 sasaran pokok yaitu:

1. Pendidikan Luar Sekolah untuk Pemuda
 - a. Sebab-sebab timbulnya:
 - 1) Banyak anak-anak usia sekolah tidak memperoleh pendidikan sekolah yang cukup.
 - 2) Mereka memperoleh pendidikan yang tradisional.
 - 3) Mereka memperoleh latihan kecakapan khusus melalui pola-pola pergaulan.
 - 4) Mereka dituntut mempelajari norma-norma dan tanggung jawab sebagai sangsi dari masyarakat.
2. Kelompok-kelompok kegiatan pendidikan luar sekolah antara lain:
 - a. Klub Pemuda
 - b. Klub-klub Pemuda tani.
 - c. Kelompok Pergaulan.
3. Pendidikan Luar Sekolah untuk orang Dewasa
Pendidikan ini timbul oleh karena:
 - a. Orang-orang dewasa tertarik terhadap profesi kerja.
 - b. Orang dewasa tertarik terhadap keahlian.

³³ <http://ikaput.blogspot.co.id/2012/10/resume-buku-metode-pembelajaran-pls-m.html>

Sesuai dengan rancangan Peraturan Pemerintah maka sasaran pendidikan luar sekolah dapat meliputi:

1. Ditinjau dari Segi Sasaran Pelayan, berupa:

a. Usia Pra-Sekolah (0-6 tahun)

Fungsi lembaga ini mempersiapkan anak-anak menjelang mereka pergi sekolah (Pendidikan Formal) sehingga mereka telah terbiasa untuk hidup dalam situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarga.

b. Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun)

Usia ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan program kejar paket A dan kepramukaan yang diselenggarakan secara sesama dan terpadu.

c. Usia Pendidikan Menengah (13-18 tahun)

Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah untuk usia semacam ini diarahkan untuk pengganti pendidikan, sebagai pelengkap dan penambah program pendidikan bagi mereka.

d. Usia Pendidikan Tinggi (19-24 tahun)

Pendidikan luar sekolah menyiapkan mereka untuk siap bekerja melalui pemberian berbagai keterampilan sehingga mereka menjadi tenaga yang produktif, siap kerja dan siap untuk usaha mandiri

2. Ditinjau dari Jenis Kelamin

Program ini secara tugas diarahkan pada kaum wanita oleh karena jumlah mereka yang besar dan partisipasinya kurang dalam rangka produktivitas dan eferiensi kerja maka pendidikan luar sekolah membanntu mereka melalui program-program PKK, Program KB dan lain-lainnya.

3. Berdasarkan Lingkungan Sosial Budaya, sasaran pendidikan luar sekolah dapat berupa:

a. Masyarakat Pendesaan.

Masyarakat ini meliputi sebagian besar masyarakat Indonesia dan program diarahkan pada program-program mata pencarian dan program pendayagunaan sumber-sumber alam.

b. Masyarakat Perkotaan.

Masyarakat perkotaan yang cepat terkena perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga masyarakat perlu memperoleh tambahan tersebut melalui pemberian informasi dan kursus-kursus kilat

c. Masyarakat Terpencil.

Untuk itu masyarakat terpencil ini perlu ditolong melalui pendidikan luar sekolah yang mereka dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan nasional.

4. Berdasarkan kekhususan Sasaran Pelajar

- a. Peserta didik yang dapat digolongkan terlantar, seperti anak yatim piatu.
- b. Peserta didik yang karena berbagai sebab sosial, tidak dapat mengikuti program pendidikan persekolahan.

5. Berdasarkan Pranata

Dalam pendidikan luar sekolah memiliki pranata yang bermacam-macam seperti: pendidikan keluarga, pendidikan perluasan wawasan dasar dan pendidikan keterampilan.

6. Berdasarkan Sistem Pengajaran

Sistem Pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah meliputi:

- a. Kelompok, organisasi dan lembaga.
- b. Mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan.
- c. Kesenian tradisioanal, seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya.
- d. Prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah dan alat-alat pelengkapan kerja.

7. Berdasarkan Segi Pelembagaan Program

Pelembagaan program yang dimaksud keseluruhan proses pengintegrasian antara program pendidikan luar sekolah dan perkembangan masyarakat.

- a. Program antara sektoral dan swadaya masyarakat seperti PKK, PKN, dan P2WKSS.

- b. Kordinasi perencanaan dasa atau pelaksana program pembangunan.
- c. Tenaga pengarahan di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.³⁴

Sedangkan menurut Ananda W.P. Guruge terdapat enam kategori sasaran PLS, yaitu:

1. Para buruh dan petani

Mereka dengan pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pendidikan sama sekali merupakan golongan terbesar penduduk di Negara-negara yang sedang berkembang. Mereka pada umumnya masih hidup dalam suasana tradisional yang dikuasai oleh tahayul, boo dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang menghambat kemajuan. Cara hidup tradisional ini merupakan hambatan psikologik bagi pembangunan. Bagi golongan penduduk ini program pendidikan barulah arti apabila program tersebut:

- a. Menolong meningkatkan produktivitet mereka, baik hal itu dicapai melalui mengajarkan keterampilan baru maupun melalui pemberian metode-metode bertani yang baru yang memungkinkan untuk memperbaiki kehidupan mereka.
- b. Mendidik mereka agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai warganegara dan sebagai kepala keluarga, sehingga mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.
- c. Memberi jalan bagi mereka untuk dapat mengisi waktu senggang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan sehingga hidup mereka menjadi lebih berarti. Golongan buruh dan petani inilah yang terutama membutuhkan program baca tulis fungsional. Mereka pasti akan menyadari manfaat program itu apabila ketoga hal tersebut betul-betul diperhatikan.

³⁴ <https://www.kompasiana.com/hfbalaghoni/54f72e3da333-110b7d8b4623/mulai-saja-pendidikan-luar-sekolah#>

2. Golongan remaja yang terganggu sekolahnya.

Golongan remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan keterampilan atau yang underemployed karena kurangnya bakat dan kemampuannya, memerlukan pendidikan vokasional yang khusus. Demi perkembangan pribadinya, mereka perlu pula diberi pendidikan cultural dan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Namun program yang terpenting bagi golongan anak didik ini ialah pendidikan bersifat remedial. Mungkin mereka meninggalkan pendidikan disekolah karena tidak tertarik, bosan atau tidak melihat manfaat pendidikan sekolah itu bagi kehidupannya. Sebab itu program remedial yang dibeikan kepadanya harus dapat menarik, merangsang dan relevan dengan kebutuhan hidupnya.

3. Para pekerja yang berkecakupan.

Bagi golongan pekerja yang berkecakupan ini, program yang disediakan baginya harus mengandung dua maksud, yaitu;

- a. Program itu harus mampu menyelamatkan mereka dari bahasa kekusangan pengetahuannya dan otomasi, kepada mereka perlu diberikan latihan-latihan kembali untuk mendapatkan keterampilan baru.
- b. Program itu harus membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang dalam rangka promosi kedudukannya yang lebih baik. Program semacam itu tidak semata-mata bersifat vokasi dan tehnik melainkan merupakan peningkatan atas pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat menghadapi tantangan-tantangan hari depan mereka.

4. Golongan technician dan professional

Program pendidikan seumur hidup itu lebih-lebih sangat besar perannya bagi golongan ini. Mereka pada umumnya menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat. Kemajuan masyarakat banyak tergantung pada golongan ini. Agar mereka tetap berperan dalam masyarakat maka

mereka harus senantiasa memperbaharui dan menambah pengetahuan dan keterampilannya.

5. Para pemimpin dalam masyarakat

Para pemimpin di masyarakat (golongan politi, agama, social dan sebagainya perlu selalu memperbaharui sikap dan ide-idenya agar mereka dapat tetap berfungsimmempim masyarakat sesuai dengan gerak kemajuan pembangunan.

6. Golongan anggota masyarakat yang sudah tua

Mereka juga memerlukan pendidikan ini. Mungkin pendidikan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga karena mereka belum pernah memperolehnya pada waktu masih muda. Program pendidikan itu terlebih-lebih untuk memenuhi kebutuhannya untuk mengetahui hal-hal yang baru, jadi tidak lagi penting dilihat dari kegunaan dan keuntungan materilnya.³⁵

C. Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Pendidikan non formal diselenggarakan berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pendidikan luar sekolah sebagai suatu sub system pendidikan disamping pendidikan informal. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan tetap dan terikat.³⁶

³⁵ Soelaiman Joesoef, Slamet Santoso. *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981. Hlm. 33

³⁶ Soelaiman Joesoef, Slamet Santoso. *Pendidikan Luar Sekolah*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981. Hlm. 52

Pendidikan luar sekolah meliputi:

1. Lembaga kursus,

Kursus tetap memenuhi unsur belajar-mengajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar dan pasilitas. Sistem pengajaran dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, praktek dan penugasan. Dan pada akhirnya kursus ada evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam Bentuk STTB

2. Lembaga pelatihan,

Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Kelompok belajar,

Kelompok belajar adalah lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Program belajar dapat berupa paket-paket belajar dan dapat disusun bersama antara sumber belajar dan warga belajar

4. Pusat kegiatan belajar masyarakat,

PKB terdapat di dalam masyarakat luas seperti pesantren, perpustakaan, gedung kesenian, rumah ibadat, kebun percobaan dan lain-lain lembaga-lembaga tersebut para peserta dapat memperoleh proses belajar-mengajar sesuai yang mereka inginkan.

5. Majelis taklim,

Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan Islam Non formal. Dan merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas muslim Indonesia. Majelis Taklim ini merupakan institusi pendidikan Islam non Formal, dan sekaligus lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Majlis Taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat peran strategisnya terutama terletak

dalam mewujudkan learning society, suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturahmi dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat.

6. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

7. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini berbentuk:

a. Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA).

Taman Kanak-Kanak adalah pelayanan pendidikan anak usia dini terutama disediakan untuk anak usia 4+ - 6+ Tahun. Demikian pula Raudathul Athfal tetapi Raudathul Athfal menekankan pada pengajaran agama Islam.

b. Kelompok Bermain (KB)

Kelompok Bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2+ - 6+ tahun. Tetapi di daerah perkotaan Kelompok Bermain cenderung untuk kelas junior yaitu untuk anak usia 2+ dan 4 + tahun, sedangkan usia 4 - 6 tahun di TK atau RA, penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA,

Kelompok Bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2+ - 6+ tahun.

c. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman Penitipan Anak menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun sementara orang tua mereka (terutama Ibu) bekerja. Taman Penitipan Anak dibangun dekat tempat kerja orang tua. Tetapi didaerah perkotaan lama-lama menjadi kegiatan pendidikan menyediakan kebutuhan mendidik dan merawat untuk ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi, sementara di pedesaan fungsi kekeluargaan anak masih dominan.

8. Posyandu

Posyandu pada dasarnya Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan pusat kesehatan masyarakat dimana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan (misalnya gizi tambahan, imunisasi dan lain-lain) untuk diri mereka dan juga anak mereka. Sekarang mulai berubah menjadi pusat pelayanan yang lebih luas untuk ibu-ibu dimana mereka datang 2 kali sebulan bukan saja untuk menerima perawatan kesehatan tetapi juga untuk belajar tentang orang tua yang memberikan pelayanan pada anak-anaknya khususnya anak usia dini. Baru-baru ini, ada usaha pelayanan kerjasama untuk anak-anak yang menemani ibu mereka ke pusatpusat pelayanan.

9. Bina Keluarga Balita (BKB)

Tujuan utama dari BKB adalah untuk menyediakan pada ibu-ibu informasi mengenai keterampilan orang tua - bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. BKB sekarang disatukan dengan Posyandu yang menekankan kembali fungsi menjadi orang tua nantinya yang bisa melayani anaknya yang masih usia dini. Baik Posyandu maupun BKB dilakukan oleh kader yang terlatih.

10. Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

11. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

12. Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

13. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah

terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.³⁷

³⁷ <http://gegige.blogspot.com/2016/12/jenis-jenis-pendidikan-luar-sekolah.html>

BAB IV

PENDIDIKAN INFORMAL, FORMAL DAN NON FORMAL

Oleh; Hadion Wijoyo,
S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA.,QWP®

A. Latar Belakang Pendidikan Informal, Formal dan Non Formal

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya pendidikan itu mengajarkan setiap individu untuk berpikir dan bertindak mencerminkan dirinya sebagai individu penerus generasi yang baik. Pendidikan dewasa ini sudah banyak melahirkan berbagai macam model pendidikan. Pendidikan formal ataupun nonformal, contohnya mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan home schooling, pendidikan khusus bagi para masyarakat yang kurang mampu dan pendidikan umum negeri maupun swasta mulai dari Taman Kanak-kanak hingga ke Perguruan Tinggi, yang bertaraf Nasional dan Internasional.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 13, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan yang memiliki peran penting untuk membentuk karakter seseorang. Dalam keluarga seseorang pertama kali berinteraksi dengan dunia luarnya. Interaksi ini sangat penting dalam menumbuhkan potensi fitrah yang ada dalam dirinya. Selain keluarga, jalur pendidikan informal juga terdapat pada lingkungan setiap individu. Lingkungan sangat erat kaitannya dengan lingkungan alamiah dan sosial seseorang.

Pendidikan nonformal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah.

Lembaga pendidikan nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang dilakukan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan Formal ini adalah lembaga pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan dengan sengaja, terencana, sistematis dalam rangka membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya agar mampu menjalankan kehidupannya.

Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan non formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana mengemukakan peran pendidikan non formal adalah sebagai "pelengkap, penambah, dan pengganti" dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah

Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program pendidikan non formal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

2. Sebagai penambah pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:

- a. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah.

- b. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh.
 - c. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.
3. Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya.³⁸

B. Hubungan Pendidikan Informal, Formal, dan Non Formal

1. Pendidikan Formal

Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

³⁸ D. Sudjana. Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung serta Asas., (Bandung: Falah Production 2001) hal 107

Apabila kegiatan yang termasuk pendidikan yang program-programnya bersifat informal ini diarahkan untuk mencapai tujuan belajar tertentu maka kegiatan tersebut dikategorikan baik ke dalam pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal maupun pendidikan yang program-programnya bersifat formal.

Kelebihan pendidikan formal:

Melatih kemampuan akademis, dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, logika dan lainnya maka diharapkan seseorang akan memiliki kemampuan akademis yang baik.

Sarana pengembangan diri dan berkarakter, semakin banyak memiliki keahlian dan daya kreativitas maka akan semakin baik pula kualitas seseorang. Dalam pendidikan formal merupakan mediator untuk pengembangan daya kreativitas karena saat menempuh pendidikan disediakan beragam program pengembangan siswa

Beberapa kekurangannya yaitu:

Bersifat kaku dan tidak fleksibel, terhadap karakter pembelajar, peran guru yang terkadang sulit membaaur dengan sikap murid yang terkadang dibutuhkan pendekatan persuasif dan komunikasi.

Formalitas, anggapan umum ini untuk menggambarkan pandangan masyarakat umum bahwa pendidikan formal masih sekedar formalitas dan tidak berfokus kepada sisi kualitas pembelajar.

2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan lembaga-

lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik.

Sasarana Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Fungsi Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Jenis Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

Pendidikan yang program-programnya bersifat informal tidak diarahkan untuk melayani kebutuhan belajar yang terorganisasi. Kegiatan pendidikan ini lebih

umum, berjalan dengan sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, serta melalui media massa, tempat bermain, dan lain sebagainya.

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah:

- a. Pendidikan dimulai dari keluarga
- b. Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga
- c. Homeschooling: pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal.
- d. Anak harus dididik dari lahir

Berikut merupakan Persamaan Pendidikan Formal, Informal, dan Non Formal, yaitu :

- a. Sama-sama menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung serta kemampuan berkomunikasi
- b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.
- c. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya dan pendidikan jasmani.
- d. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal yang relevan.
- e. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan dan/atau teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.

- f. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan dan/atau teknologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal yang relevan.
- g. Kelompok mata pelajaran estetika dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- h. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani , olah raga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam dan muatan lokal yang relevan.
- i. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- j. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.
- k. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- l. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- m. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- n. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
- o. Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada Permendikans No. 23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006.

- p. Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan oleh peraturan menteri berdasarkan usulan BNSP
- q. Setiap satuan pendidikan formal, nonformal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

BAB V

CIRI DAN KEGIATAN SISTEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)

A. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dimana keluarga berfungsi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Menurut Ki Hajar Dewantara, “Keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih, demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Begitu pentingnya keluarga dari kehidupan manusia bagi individu maupun sekelompok orang”.³⁹ Abdullah dan Berns juga memperkuat agrumen, bahwa “Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama kerja sama ekonomi, dan reproduksi”⁴⁰

UU Sisdiknas, Bagian Keenam tentang Pendidikan Informal, Pasal 27 berbunyi bahwa:

1. Kegiatan pendidikan informal yang di lakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
2. Hasil pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.

³⁹ M syahrani Jailani, Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini”, (Nadwa Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014), h. 246

⁴⁰ Ibid, h.247

Ciri ciri atau karakteristik pendidikan informal, diantaranya yaitu:

1. Kegiatan belajar terbentuk secara mandiri.
2. Tidak terikat dengan waktu dan tempat.
3. Proses belajar berlangsung tanpa ada pendidik dan peserta didik, namun antara orangtua dengan anak atau
4. antara kakak dengan adik.
5. Tidak mengenal persyaratan usia.
6. Tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi.
7. Peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu.
8. Proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan.
9. Tidak ada kurikulum tertentu yang harus dijalankan.
10. Tidak ada jenjang dalam proses pendidikannya.
11. Proses pendidikan dilakukan secara terus menerus tanpa mengenal ruang dan waktu
12. Orang tua adalah guru bagi anak didik.
13. Tidak terdapat manajemen yang jelas dalam proses pembelajaran.
14. Tidak menggunakan metode yang komplikatif yang sulit di mengerti atau sulit dilaksanakan.
15. Bahan pembelajaran cukup sederhana.
16. Tidak terorganisasi secara struktural.
17. Tidak ada penjenjangan kronologis
18. Tidak mengenal adanya kredensial.

Fungsi dan peran utama pendidikan informal yaitu untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Lebih lengkapnya, fungsi dan peran pendidikan informal, diantaranya yaitu:

1. Membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non formal.
2. Mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar.
3. Membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan.

4. Membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak.
5. Memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya.
6. Membantu anak lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan peran keluarga terutama orang tua, sangat besar terhadap pertumbuhan seorang anak. Dalam pendidikan ini, orang tua berperan sebagai pendidik, pembimbing, teladan, pengontrol, fasilitator, motivator, sekaligus juga inovator.

Seperti yang diketahui, proses penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Berikut ini contoh jalur pendidikan informal diantaranya yaitu:

1. Pendidikan budi pekerti.
2. Pendidikan agama.
3. Pendidikan moral.
4. Pendidikan etika.
5. Pendidikan sopan santun.
6. Sosialisasi dengan lingkungan.

Pendidikan informal adalah pendidikan pemula, sebelum melangkah kepada pendidikan formal. Berhasil atau tidaknya pendidikan formal atau pendidikan sekolah bergantung pada dan dipengaruhi pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan ini adalah fundamen atau dasar bagi pendidikan selanjutnya. Hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Hal tersebut tidak bisa disangkal bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam lingkungan keluarga bagi perkembangan anak-anak menjadi manusia yang berprilaku dan berguna bagi masyarakat.

B. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal bisa juga diartikan sebagai pendidikan kegiatan belajar mengajar yang diadakan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Sasaran pendidikan non formal yaitu bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, diantaranya yaitu:

1. Taman kanak-kanak (TK)
2. Raudatul Athfal (RA)
3. Taman Pendidikan Al-Qur'an
4. Kelompok bermain (KB)
5. Taman bermain anak (TBA)
6. Lembaga kursus
7. Sanggar
8. Lembaga pelatihan
9. Kelompok belajar
10. Pusat kegiatan belajar masyarakat
11. Majelis taklim

Tujuan utama pendidikan di luar sekolah adalah untuk untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Secara umum, tujuan pendidikan non formal diantaranya yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar. Misalnya seperti pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, dan sebagainya.
2. Untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup.

Misalnya meditasi, pendidikan kesenian, pengajian, sekolah minggu, dan lain-lain.

Berikut karakteristik atau ciri pendidikan non forma, diantaranya yaitu:

1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non formal menekankan pada belajar yang fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan peserta didik.
2. Berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya.
3. Waktu penyelenggaraannya relative singkat, dan pada umumnya tidak berkesinambungan.
4. Menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka, dan banyak ditentukan oleh peserta didik.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dengan penekanan pada belajar mandiri.
6. Hubungan pendidik dengan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator bukan menggurui.
7. Hubungan diantara kedua pihak bersifat informal dan akrab, peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber dan bukan sebagai instruktur.
8. Penggunaan sumber-sumber local. Mengingat sumber-sumber untuk pendidikan sangat langka, maka diusahakan sumber-sumber local digunakan seoptimal mungkin.

Berikut ini manfaat dan peran pendidikan non formal diantaranya yaitu:

1. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah
Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi

pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program pendidikan non formal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

2. Sebagai penambah pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:

- a. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah.
- b. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh.
- c. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.

3. Sebagai pengganti pendidikan sekolah

Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis keterampilan lainnya.

BAB VI

BENTUK-BENTUK

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS)

A. Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke empat menyatakan bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lembaga kursus sebagai lembaga pendidikan luar sekolah (PLS) yang diprakarsai, dibiayai, dan diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok maupun komunitas yang melayani masyarakat dalam belajar guna mendapatkan pengetahuan, keterampilan (*skill*) fungsional, dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memperoleh pekerjaan, berusaha mandiri, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁴¹

Menurut Komar⁴² salah satu pengertian sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem kegiatan pendidikan pada satuan kursus terdiri atas input, proses dan output. Input satuan kursus terbagi atas: input lingkungan (*environmental input*), input instrumen (*instrumental input*), input bahan mentah (*raw input*), dan input lain (*other input*). Di antara

⁴¹ Triyana, Y. F. (2012). *Tips Merintis Dan Mengelola Berbagai Lembaga Kursus*. Yogyakarta: Laksana, hal 14

⁴² Komar, O. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hal 203-204

faktor yang merupakan input lingkungan adalah keadaan alam sekitar, lingkungan, keluarga, dan masyarakat, sosial ekonomi, biaya, sarana dan kebiasaan/tradisi.

Input instrumen satuan kursus terdiri dari tujuan, kurikulum, tenaga kependidikan, pembiayaan, sumber daya dan media belajar, fasilitas dan kondisi pengelola program. Input bahan mentah terdiri atas karakteristik internal dan eksternal warga belajar. Diantaranya menyangkut pengetahuan, pengalaman, keterampilan, kesiapan, motivasi, sosial ekonomi, biaya, sarana, dan kebiasaan belajar. Input lain merupakan faktor pendukung terhadap pengaktualisasian kemampuan yang telah diperoleh oleh warga belajar selama pendidikan berlangsung, seperti lapangan pekerjaan, permodalan, pemasaran, fasilitas informasi, kursus lanjutan, dan ikatan lulusan. Proses (throughput) yang terjadi di dalam satuan kursus merupakan fungsi dari peran serta dan bekerjanya faktor input (input lingkungan, instrumen, bahan mentah dan input lain). Selama proses berlangsung, bagi input bahan mentah akan terjadi pengentasan dalam bentuk pembelajaran, bimbingan, latihan dan interaksi lainnya yang memungkinkan terwujudnya perubahan pada pengetahuan, sikap, keterampilan dan kebiasaan warga belajar. Output satuan kursus berkenaan dengan produk dan dampak. Produk berhubungan dengan segala hal yang dihasilkan oleh kursus baik berkualitas maupun kuantitasnya serta barang dan jasa. Adapun dampak (outcome) berhubungan dengan konsekuensi ikatan yang melekat pada warga belajar setelah mengikuti pendidikan, seperti perubahan taraf hidup, penyebarluasan bahan belajar, serta peningkatan partisipasi sosial dalam pembangunan.

Berikut Pengelolaan Pembelajaran Kursus :

1. Kemitraan

Jaringan kemitraan⁴³ adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka

⁴³ Kamil, M. (2010). Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep Dan Aplikasi). Bandung: Alfabeta, hal 166

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Menurut Kartasasmita dalam Banowati⁴⁴, kemitraan terutama dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja strategis, yang hasilnya bukanlah suatu *zero-sum game*, tetapi *positive-sumgame* atau *win-win situation*. Menurut Kartasasmita dalam Banowati⁴⁵, dalam upaya mengembangkan dunia usaha, terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. Kemitraan antar skala usaha,
- b. Kemitraan usaha antar daerah tau antar kawasan,
- c. Kemitraan usaha antar sektor, dan
- d. Kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan iptek.

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan hal tersebut Gunawan⁴⁶ menjelaskan administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai (*ready for use*) dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Modal dan Strategi Kewirausahaan

Dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal yang berwujud (tangible) seperti uang dan

⁴⁴ Banowati, R. (2014). Upaya Pengelola Lembaga Kursus Menjahit Dalam Mempersiapkan Lulusannya Memasuki Lapangan Kerja (Skripsi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hal 31

⁴⁵ Ibid., Hal 33

⁴⁶ Gunawan, A. H. (2002). Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro). Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 114

barang, tetapi juga modal yang tidak berwujud (intangible) seperti modal intelektual, modal sosial, modal moral, dan modal mental yang dilandasi agama. Secara garis besar, modal kewirausahaan dapat dibagi ke dalam empat jenis, yaitu:

a. Modal Intelektual.

Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab sebagai modal tambahan. Ide merupakan modal utama yang akan membentuk modal lainnya.

b. Modal Sosial dan Moral.

Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga dapat membentuk sebuah kerjasama. Seorang wirausaha yang baik biasanya memiliki etika wirausaha seperti: (a) kejujuran; (b) memiliki integritas; (c) menepati janji; (d) kesetiaan; (e) kewajaran; (f) suka membantu orang lain; (g) menghormati orang lain; (h) warga negara yang baik dan taat hukum; (i) mengejar keunggulan; dan (j) bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi maupun sosial, kejujuran, integritas, dan ketepatan janji merupakan modal sosial yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari waktu ke waktu.

c. Modal Mental.

Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, diwujudkan dalam bentuk keberanian.

d. Modal Material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini terbentuk apabila seseorang memiliki jenis-jenis modal di atas

B. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu wadah dari program-program yang diluncurkan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PLS.P. Berdasarkan definisi dari KNIU dan BP-PLS.P (2005), Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) adalah suatu wadah yang menyediakan informasi dan kegiatan belajar sepanjang hayat bagi setiap warga masyarakat agar mereka dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menawarkan beberapa keuntungan bagi para warganya, yakni: PKBM adalah tempat terjadinya kegiatan pengembangan dan pembelajaran masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan warga, PKBM menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi warga sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan, agama, seni, serta budaya, dan PKBM merangsang kemandirian warga yang memungkinkan mereka berkontribusi terhadap pembangunan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya bahkan pada pembangunan bangsa.

Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan.⁴⁷ Keberadaan PKBM haruslah sepenuhnya demi kemajuan kehidupan masyarakat dimana PKBM tersebut berada dan pemilihan program-program yang diselenggarakan di PKBM harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini juga tentunya juga tidak berarti menutup kemungkinan anggota masyarakat diluar masyarakat tersebut untuk turut serta dalam pembelajaran dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Menurut Sihombing⁴⁸ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan

⁴⁷ Sudjana. (2004). Pendidikan Nonformal. Bandung: Falah Production, hal 2

⁴⁸ Umberto Sihombing. 2000. Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi. Jakarta: PD Mahkota, hal 157

dan kebermanfaatannya program bagi warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di lingkungannya.

Menurut Yoyon Suryono dan Sumarno⁴⁹, “kelahiran PKBM dilatarbelakangi oleh niat untuk menjembatani warga belajar yang biasanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan tetapi tidak selalu memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar, dengan pasar atau pengguna potensial produk yang dihasilkan oleh warga belajar”. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Secara umum program-program yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah sebagai berikut: Program Kelompok Belajar Usaha (KBU), Keaksaraan, Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA, kursus-kursus, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan program-program ketrampilan lainnya. Berdasarkan beberapa konsep dan pengertian mengenai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diatas, dapat disimpulkan bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar system pendidikan formal baik dipertanian maupun di pedesaan dan bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga dengan definisi tersebut, PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada disekitar lingkungannya, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

⁴⁹ Sumarno dan Yoyon Suryono. (2012). Pembelajaran Kewirausahaan Masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media, hal 43

Menurut Mustofa Kamil,⁵⁰ ada tiga tujuan penting dalam rangka pendirian dan pengembangan PKBM:

1. Memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri (berdaya),
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi,
3. Meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan non formal dapat dilakukan melalui PKBM. Melalui pendidikan yang dilakukan di PKBM, masyarakat diharapkan dapat memberdayakan dirinya. Fungsi PKBM adalah:

1. Tempat pusan berbagai potensi yang ada dan berkembang dimasyarakat,
2. Sebagai sumber informasi yang handal bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional, 3) sebagai tempat tukar menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional diantara warga masyarakat.

Menurut Umberto Sihombing⁵¹, dalam pelaksanaannya PKBM memiliki asas-asas yang diterapkan, asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, kebermaknaan, kebersamaan, kemandirian, keselarasan, kebutuhan dan tolong menolong. Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas kemanfaatan artinya setiap kehadiran PKBM harus benar-benar member manfaat bagi masyarakat sekitar dalam upaya memperbaiki dan mempertahankan kehidupannya.
2. Asas kebermaknaan artinya dengan segala potensinya harus mampu memberikan dan menciptakan program yang

⁵⁰ Mustofa Kamil. (2011). Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui PKBM di Indonesia. Bandung: Alfabeta, hal 87

⁵¹ Op.Cit., Umberto Sihombing, hal. 108-109

bermakna dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar.

3. Asas kebersamaan merupakan lembaga yang dikelola secara bersama-sama bukan milik perorangan, bukan milik suatu kelompok atau satu golongan tertentu dan bukan milik pemerintah. PKBM adalah milik bersama dan digunakan bersama untuk kepentingan bersama.
4. Asas kemandirian artinya pelaksanaan dan pengembangan kegiatan harus mengutamakan kekuatan sendiri. Meminta dan menerima bantuan dari pihak lain merupakan alternatif terakhir bila kemandirian belum dapat tercapai.
5. Asas keselarasan artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dan selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitar.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional⁵², parameter dalam penyelenggaraan suatu PKBM terdiri dari:

1. Partisipasi Masyarakat (*community participation*)

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam PKBM, akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Partisipasi masyarakat juga akan menunjukkan dalam dukungan penyediaan sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide, gagasan dan sebagainya.

2. Manfaat bagi masyarakat (*impact*)

Maksudnya adalah seberapa besar PKBM memberikan sumbangan bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas. Sumbangan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan, dll.

⁵² Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2006, Tentang Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA, hal 15-16

3. Mutu dan relevansi program

Untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program.

4. Kemandirian dan keberlanjutan lembaga (*sustainability*)

Kemandirian yang dimaksud adalah PKBM tetap berjalan dengan baik tanpa tergantung kepada berbagai pihak lain, sedangkan keberlanjutan lembaga maksudnya adalah kemampuan PKBM untuk tetap berjalan terus menerus melaksanakan seluruh programnya. Untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan lembaga perlu dikembangkan sistem pendanaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan, membangun sistem manajemen yang baik, melakukan pelatihan dan pengembangan personalia yang baik dan melakukan kaderisasi kepemimpinan.

C. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁵³

Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan pra-sekolah, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun.⁵⁴

Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan

⁵³ UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14

⁵⁴ Hasnida, Analisis kebutuhan anak usia dini, (Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015) hal. 167

dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak⁵⁵. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia emas (*golden age*). Makanan yang bergizi yang seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut.

Program pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak. Proses pendidikan usia dini terjadi sejak anak dalam kandungan, masa bayi hingga anak berumur kurang lebih delapan tahun. Pendidikan ini diberikan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantuperkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani. Agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Dengan demikian, jenis kegiatannya dapat berupa taman kanak-kanak, kelompok bermain, penitipan anak dan kegiatan lembaga lain yang dijiwai oleh ciri lembaga atau institusinya. Oleh karena itu materi kegiatannya dapat berhubungan dengan agama, budi pekerti, etika, moral, toleransi, keterampilan, gotong royong, keuletan, kejujuran dan sifat yang lain yang semuanya dimasukkan dalam sebuah permainan.⁵⁶

Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya: psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neuro sains atau ilmu tentang perkembangan otak manusia.⁵⁷

Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau

⁵⁵ Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009) hal. 7

⁵⁶ Hasnida, Op. Cit., hal. 168

⁵⁷ Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009) hal. 10.

fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu dan berpengaruh besar pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Dari segi empiris banyak sekali penelitian yang menyimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini sangat penting, karena pada waktu manusia dilahirkan, menurut Clark dalam Yuliani Nurani Sujono, 2009 kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100 - 200 milyar sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal, tetapi hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi otak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak.

Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.⁵⁸

Dalam pasal 28 ayat 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudathul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat. Satuan pendidikan anak usia dini merupakan institusi pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun. Di Indonesia ada beberapa lembaga pendidikan anak usia dini yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu:

⁵⁸ UU Nomor 20 Tahun 2003 (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) Bab I Pasal 1 Ayat 14.

1. Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA)

TK merupakan bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun, yang terbagi menjadi 2 kelompok : Kelompok A untuk anak usia 4 - 5 tahun dan Kelompok B untuk anak usia 5 - 6 tahun.

2. Kelompok Bermain (Play Group)

Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.⁵⁹

3. Taman Penitipan Anak (TPA)

Taman penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.⁶⁰

4. Satuan PAUD Sejenis SPS

Satuan PAUD sejenis (SPS) adalah layanan minimal meruokakan layanan minimal yang hanya dilakukan 1-2 kali/minggu atau merupakan layanan PAUD yang ddintegrasikan dengan program layanan lain. Peserta didik pada SPS adalah anak 2-4 tahun.⁶¹

⁵⁹ Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009)hal: 23

⁶⁰ Ibid., hal.24

⁶¹ Hasnida, Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini, ((Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015) hal. 180

Dalam melaksanakan Pendidikan anak usia dini hendaknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶²

1. Berorientasi pada Kebutuhan Anak

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motoric, dan sosioemosional.

2. Belajar melalui bermain

Bermain merupakan saran belajar anak usia dini. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya.

3. Lingkungan yang kondusif

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta nyaman yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.

4. Menggunakan pembelajaran terpadu

Pembelajaran pada anak usia dini harus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang dilakukan melalui tema. Tema yang dibangun harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak dan bersifat kontekstual. Hal ini dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas sehingga pembelajaran menjadi mudah dan bermakna bagi anak.

5. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup

Mengembangkan keterampilan hidup dapat dilakukan melalui bergai proses pembiasaan. Hal ini dimaksudkan agar anak belajar untuk menolong diri sendiri, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki disiplin diri.

⁶² Ibid., 169-170

6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar
Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik/guru.
7. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang
Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Agar konsep dapat dikuasai dengan baik hendaknya guru menyajikan kegiatan-kegiatan yang berluang.

D. Pendidikan Dalam Keluarga

Tumbuh kembangnya beberapa aspek manusia baik fisik atau psikis, sosial dan spiritual, yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya, sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang akan tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak, sangat ditentukan oleh peran pendidikan dalam keluarga.

Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Bahwa menurut beliau keluarga merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami isteri. Maka dapat difahami bahwa Pengertian Keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental

mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.

Fitzpatrick 63, memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu. Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

Pengertian Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu.

Pengertian Keluarga secara Transaksional: Defenisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.

Keluarga juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*conjugal family*) dan keluarga kerabat (*consanguine family*). *Conjugal Family* atau keluarga inti didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Sedangkan *Consanguine family* tidak didasarkan pada pertalian suami istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang

⁶³ Lestari, Sri. 2012. Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Prenada Media Group

kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan darah dari beberapa generasi yang mungkin berdiam dalam satu rumah atau pada tempat lain yang berjauhan. "Kesatuan keluarga *consanguine* ini disebut juga sebagai *extended family* atau "keluarga luas.

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, dalam membentuk jati diri para generasi muda, Anak sebagai generasi penerus harus memiliki jati diri masyarakat dan bangsanya. Perwarisan nilai-nilai budaya sangat mungkin dilakukan keluarga. Pendidikan dalam keluarga yang tepat dan benar, merupakan modal dasar bagi perkembangan kepribadian anak masa dewasanya. Tiga tahun pertama sebagai fase pembangunan fondasi struktur otak anak pertama dibentuk, usia tujuh tahun hampir sempurna otak dibentuk Pola asuh ramah otak yang dapat membangun karakter anak, sejak dini. Keluarga sangat memberikan pengaruh dalam pembentukan kepribadian yang mendasar seseorang.

Hampir di seluruh dunia keluarga berubah dari keluarga luas ke keluarga inti. Struktur keluarga tradisional juga berubah, terutama di kota-kota besar. Perceraian, rujuk,, ibu yang masih remaja,, ibu yang bekerja yang seluruh waktunya tercurah untuk pekerjaan di luar rumah, adalah bagian dari perubahan bentuk dan struktur keluarga. Semakin Keluarga conventional yang konsepnya adalah solidaritas, saling menerima, saling percaya, saling tergantung satu sama lain untuk saling memenuhi keinginan dan kebutuhan sehingga tercapai ketentraman dalam kehidupan keluarga. Pada saat ini kondisi demikian dianggap sudah tidak layak dan tidak sesuai lagi. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama yang membentuk alam spiritual dan moral seseorang dan bangsa; lembaga pendidikan yang memberikan makna martabat manusia, kepribadian individu dan kehidupan demokrasi., membentuk standar individu dan integritas kelompok. Nilai berhubungan dengan apa yang baik dan yang buruk yang harus dilakukan terhadap orang lain. Sosialisasi adalah suatu proses individu mulai menerima dan menyesuaikan diri

dengan unsur-unsur kebudayaan di lingkungannya. Fungsi sosialisasi adalah membina kepribadian anak, membina anak bertingkah laku sesuai dengan norma masyarakat, Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, maka orang tua sejak individu dilahirkan diberikan pendidikan bersosialisasi untuk mengenal, memahami, menaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku. Pendidikan demikian disebut pengasuhan anak.

Kita hidup dalam lingkungan budaya yang beraneka ragam dipandang dari asal usul, waktu, tempat dan coraknya. Inti kebudayaan nilai-nilai, konsep dasar, arah berbagai tindakan Nilai budaya mondial, transnasional, pranata nilai budaya yang berada di jalur utama (*main stream*), budaya nasional, etnik local. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren berbasis nilai budaya daerah sendiri, pembentukan karakter dan identitas bangsa. Nilai budaya ditanamkan melalui pendidikan. Pendidikan menyesuaikan nilai-nilai dasar kehidupan untuk masa depan.

Pada era globalisasi ini nilai budaya feodal tidak lagi cocok untuk dijadikan norma, tetapi budaya egaliter lebih cocok, karena nilai Moral Pancasila telah mendapatkan tempat yang selaras di dalam system pendidikan nasional. Sesuai dengan nilai moral Pancasila, maka nilai budaya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari yaitu kerja keras, budaya yang memperhatikan bobot atau mutu bukan hanya gaya di luar; pribadi yang sederhana bukan memprioritaskan penampilan, budaya yang banyak menimbulkan simpati, hemat, produktif, memperhatikan kebersihan, berkompetisi namun dapat pula bekerja sama.

Pendidikan nilai dalam kehidupan keluarga sehari-hari merupakan berbagai macam aktivitas pengalaman dan metode untuk membantu anak mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai agama, etika humanistik, nilai pribadi dan nilai sosial. Nilai apa yang dikembangkan orang tua dapat diamati anak dalam kehidupan sehari-hari dari gagasan, pandangan dan pengarahan orang tua yang dihargai ideal atau dianggap

lebih baik yang dilakukan dan dikerjakan anak. Untuk aktivitas yang membingungkan, kadang-kadang orang tua dalam memberikan pengarahan mengajukan pilihan-pilihan, yang dapat dilakukan anak. Keputusan atau aturan yang telah diterima dan diakui oleh semua anggota keluarga perlu dikukuhkan menjadi komitmen anggota keluarga. Nilai diterima semua anggota keluarga sebagai suatu patokan yang mengarahkan perilaku setiap anggota keluarga. Nilai mencakup norma-norma, standar-standar perilaku dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku. Konsekuensinya nilai menentukan tujuan dan alat mana yang sebaiknya digunakan..

Orang tua perlu berusaha menjadikan anak sebagai manusia muda menjadi pribadi dewasa mandiri yang kompeten, tanggung jawab dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, percaya diri. tidak merasa rendah diri, terbuka ,dapat menerima orang lain , menghargai kedamaian, penghargaan, cinta, tanggung jawab, kebahagiaan, kerja sama, kejujuran, kerendahan hati, toleransi, kesederhanaan , persatuan. Anak paling mudah belajar dari contoh dan paling terbuka pada pengalaman yang diceriterakan orang tua. Kesabaran, kasih sayang memandang keindahan masing-masing anak sangat penting dan merupakan aspek-aspek yang tak ternilai harganya. Cara-cara interaksi kooperatif dan suasana yang berbasis nilai Pedoman perilaku anak yang dikembangkan orang tua merupakan payung umum untuk berbagai elemen pendidikan yang merupakan dasar. Elemen ini meliputi nilai, perilaku, kepribadian, sosial, kesehatan, iman dan spiritual, kesenian disamping pernyataan mengenai prinsip-prinsip dari penjabaran nilai. Pemahaman yang mudah mengenai spiritual adalah memikirkannya sebagai dunia pikiran dan perasaan di dalam pribadi diri kita. Suatu dunia yang nyata berada dalam kesadaran kita, walaupun tidak dapat kita lihat. Hasil pikiran dan perasaan yang dapat dilihat dalam bentuk tindakan yang menciptakan dunia objek material. Untuk menyadari keberadaan spiritual, kualitas alami kita yang membimbing menuju hidup yang penuh dan bahagia.

Awali dengan mengembangkan suatu pemahaman dunia pikiran, perasaan dan emosi dalam diri kita. Ini semua adalah dunia spiritual kita. Suatu pemahaman yang jelas dari spirit kita. Kita sendiri akan memungkinkan kita mengembangkan suatu pemahaman akan konsep spiritualitas, yang merupakan jantung dari pendidikan nilai. Kita manusia terdiri dari tubuh dan roh (spirit). Kita sadar akan tubuh kita dan suatu pemikiran sesaat akan membuat kita juga sadar bahwa kita adalah makhluk sadar, dengan gagasan, perasaan dan emosi yang kuat. Ketiga ini merupakan inti dunia spiritual. Kita dapat memikirkan cara untuk mengembangkan tubuh fisik atau fikiran intelektual. Kita tumbuh menjadi orang dewasa yang sempurna bila kita mengembangkan spirit kita yang akan mampu menuju hidup yang penuh dan bahagia. Spirit adalah sumber dari kualitas dan *virtue* seperti cinta, kepercayaan, kebenaran dan kedamaian; itu adalah diri yang lebih tinggi. Ini perlu dibimbing untuk mempengaruhi kualitas diri sendiri dan hidup orang lain. Spirit yang kita miliki dapat menunjukkan bahwa kita lebih dari peranan yang kita mainkan.

Refleksi tenang adalah jalan untuk mengetahui spiritual diri kita sendiri. Berikan waktu untuk bersama diri kita sendiri dan mulai mengeksplorasi spiritual diri kita sendiri, dengan duduk tenang dalam suatu cara yang positif, memfokuskan pada aspek-aspek diri sendiri yang menciptakan perasaan yang baik. Berikan kepada diri kita waktu yang teratur, tenang dan reflektif yang menempatkan kita berhubungan dengan spiritual diri kita sendiri, menciptakan keberadaan diri kita dan membantu kita memiliki control akan hidup kita. Metode ini sederhana yang memerlukan satu komitmen untuk meluangkan waktu regular untuk mempraktekannya. Semakin banyak kita meningkatkan kualitas spiritual kita, semakin banyak kita meningkatkan penghargaan dan kepercayaan diri dari orang lain.

Pendidikan nilai dalam kehidupan keluarga di tengah-tengah perubahan kebudayaan dengan segala tantangannya harus dapat menemukan fungsinya secara tepat sehingga pada

satu sisi ikut memperkuat sifat stabil dari kebudayaan dan pada sisi lain dapat mendorong dinamika kearah pencapaian tujuan nasional. Kita hidup dalam di dalam lingkup yang beraneka macam dipandang dari asal usul, waktu, tempat dan coraknya. Dalam situasi demikian lumrah terjadi pergeseran, pencampur-bauran, persilang-siuran dan malah pertentangan. Orang tua dituntut untuk melakukan pilihan dan penyusunan serta serentak mengusahakan suatu keutuhan dan keserasian yang berkembang tanpa memusnahkan corak ragam yang ada. Orang tua sebagai pendidik perlu memiliki keberanian di bidang ilmu dan amal sehingga mau berdiri di pintu-pintu keutamaan dan menerima hal-hal yang penting.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan PLS tersebut maka aliran filsafat pendidikan idealisme dan realisme dapat digunakan sebagai landasar teoretis maupun praktis. Berikut ini akan dikemukakan implikasi filsafat pendidikan idealisme dan realisme dalam penyelenggaraan PLS dalam menetapkan tujuan, kurikulum, metode, serta peran peserta didik dan pendidik.

Dengan memperhatikan implikasi filsafat pendidikan realisme maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama: tujuan program PLS pertama-tama harus difokuskan pada pembentukan karakter atau kepribadian peserta didik. Pada tahap selanjutnya program pendidikan tertuju kepada pengembangan bakat dan kebaikan sosial. Peserta didik digali potensinya untuk tampil sebagai individu berbakat/berkemampuan yang akan memiliki nilai guna bagi kepentingan masyarakat.

Kedua, kurikulum pendidikan PLS dikembangkan dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan

praktis. Kurikulum diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan berpikir melalui pendidikan umum. Di samping itu kurikulum juga dikembangkan untuk mempersiapkan keterampilan bekerja untuk keperluan memperoleh mata pencaharian melalui pendidikan praktis.

Ketiga, metode pendidikan dalam program PLS disusun menggunakan metode pendidikan dialektis. Meskipun demikian setiap metode yang dianggap efektif mendorong belajar dapat pula digunakan. Pelaksanaan pendidikan cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis dalam belajar.

Keempat, peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Pendidikan bekerjasama dengan alam dengan proses pengembangan kemampuan ilmiah. Oleh karena itu tugas utama tenaga pendidik adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan efisien dan efektif.

Dengan memperhatikan implikasi filsafat pendidikan idealisme maka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, tujuan program pendidikan PLS terfokus agar peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup. Disamping itu, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat.

Kedua, kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja.

Ketiga, semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, bertahap dan berurutan. Pembiasaan (pengkondisian) merupakan sebuah metode pokok yang dapat dipergunakan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keempat, Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan Iptek. Dalam hubungannya dengan disiplin, tatacara yang baik sangat penting dalam belajar. Artinya belajar dilakukan secara terpolu berdasarkan pada suatu pedoman. Peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikkkan. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, keterampilan teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan kepadanya.

E. Hubungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dengan Prestasi Belajar

Dalam Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 10, yang dimaksud dengan Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bedjo dalam Suharni bahwa: “Berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan prestasi belajar siswa di antaranya adalah siswa sebagai individu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat”. Pendapat tersebut menguatkan bahwa ke tiga aspek tersebut saling berkaitan dalam pengupayaan pendidikan yang optimal.

Berbagai upaya dilakukan agar program-program pendidikan dari ke tiga sub sistem tersebut saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan lainnya dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Di lingkungan keluarga di upayakan berbagai hal terkait pola asuh yang efektif, antara lain dengan kasih sayang, motivasi, perhatian, pendidikan keagamaan, pendidikan etika, serta dalam hal asupan gizi yang menunjang yang dapat menjadi landasan pengembangan atau peningkatan prestasi belajar baik di sekolah khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dengan dukungan penuh dari keluarga peserta didik akan lebih merasa termotivasi untuk mencapai tingkat prestasi belajar yang baik di sekolah. Pengaruh yang besar antara pendidikan keluarga dengan prestasi belajar siswa. Dalam pendidikan informal, orang tua berperan dalam pembentukan sikap siswa, prestasi yang baik dan berkualitas. Sikap yang demokratis dan bijaksana dari orang tua siswa dapat meningkatkan keinginan untuk lebih giat belajar supaya dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi.

Dalam lingkungan formal, guru sebagai pengemban tanggung jawab hendaknya dapat menggantikan fungsi orang dewasa dalam keluarga sebagai pendidik. Tidak hanya dengan motivasi dan perhatian, penggunaan media pengajaran dan metode penyampaian materi yang baik juga memberikan nilai yang sangat menunjang keberhasilan peserta didik dalam berprestasi.

Di samping pendidikan formal dan informal, pendidikan non formal memiliki fungsi yang tak kalah penting dalam pencapaian prestasi belajar yang baik. Pendidikan non formal ini dapat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, penambah juga pengembang pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah. Dalam rangka mengoptimalkan prestasi belajar, individu atau peserta didik dapat menambah pengetahuannya mengenai bidang pendidikan yang di peroleh pada pendidikan non formal.

Dari pemaparan di atas terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan formal, non formal dan informal sebagai upaya peningkatan prestasi belajar. Dengan demikian dapat diartikan pendidikan formal dan non formal berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan pendidikan informal, dan pendidikan informal diharapkan dapat bekerja sama serta mendukung kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ketiga sub sistem tersebut tidak dapat dipisahkan, namun saling menyempurnakan dan pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan prestasi belajar atau keberhasilan pendidikan individu.

BAB VII

MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

A. Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional” dan ayat (3) menyatakan bahwa “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Pengendalian mutu program PNF sebagaimana telah dipaparkan di atas merupakan suatu proses melihat, mengamati dan menilai program pendidikan nonformal dan informal dengan menggunakan suatu cara atau metode agar program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dengan standard yang baik serta memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dilihat dari jenis dan macam pengendalian mutu program PNF, sebagaimana diamanatkan dalam rancangan peraturan Menegpan dan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, yang meliputi:
 - a. Perencanaan program pengendalian mutu PNF;
 - b. Pelaksanaan pemantauan program PNF;
 - c. Pelaksanaan penilaian program PNF;
 - d. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNF; dan
 - e. Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNF.
2. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNF;
 - b. Penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNF;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNF; dan
 - d. Presentasi hasil evaluasi dampak program PNF.

Langkah-langkah pengendalian mutu program tersebut dapat diterapkan dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan nonformal manakala beberapa persyaratan dibawah ini terpenuhi:

1. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.
2. Penilaian kebutuhan (*need assesment*)
3. Perencanaan Strategik, melalui perumusan visi dan misi, identifikasi pelanggan dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)
4. Penyusunan rencana taktis
5. Penilaian kemajuan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu program, yang dewasa ini berkembang menjadi penjaminan mutu program antara lain: kurikulum, manajemen kelembagaan, organisasi, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan.

Salah satu tantangan dalam Pendidikan Nonformal adalah Pengendalian mutu dan keberlanjutan pelaksanaan program PNF belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, padahal dilihat dari manfaatnya pengendalian mutu program sangat banyak. Bahwa pengendalian mutu program bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi dengan cara mengusahakan setiap langkah yang dilaksanakan, setiap sumberdaya yang digunakan dan setiap aspek yang terlibat dalam proses produksi dievaluasi secara terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Adapun secara lebih rinci manfaat adanya pengendalian mutu program adalah:

1. Memberi masukan untuk perencanaan program
2. Memberi masukan untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, perluasan atau penghentian program
3. Memberi masukan untuk keputusan tentang modifikasi program
 - a. Memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat
 - b. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi pengendalian mutu program selanjutnya.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Agar pengendalian mutu program dapat efektif, maka strategi yang harus dipergunakan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Teliti (*accurate*), artinya informasi yang dihasilkan dari pengendalian harus benar
2. Berkala (*timely*), informasi harus diperoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dapat diberikan secara berkala juga
3. Objective dan komprehensif, sistem pengendalian harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat.
4. Terfokus pada titik pengendalian yang strategis, pengendalian harus difokuskan pada titik-titik sehingga penyimpangan dari standar dapat segera diketahui.

5. Realistik (*economically and organization realistic*), sistem pengendalian mudah dilakukan sehingga biaya rendah
6. Fleksibel, pengendalian mutu program cukup lentur dalam menghadapi hal-hal yang tidak biasa atau menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan/diduga.
7. Preskriptif dan operasional, apabila standar performansi tidak ditemukan, sistem pengendalian mutu program akan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan dan;
8. Diterima oleh anggota organisasi (*acceptable to organizational members*), sistem pengendalian harus dapat diterima oleh seluruh staf dalam organisasi.

C. Indikator Atau Penilaian Mutu Pendidikan Non Formal (PNF)

Menurut Nanang Fattah⁶⁴ tujuan penjaminan mutu ada dapat dilihat secara umum dan khusus. Tujuan Grand Design Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan secara umum adalah untuk memberikan acuan bagi unit-unit Pembina, pelaksana dan penyelenggara satuan pendidikan yang ada di pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan formal. Nonformal yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan Secara khusus pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk mengatur peran, tanggung jawab dan apa yang harus dilaksanakan dalam:

1. Penempatan regulasi dan standar penjaminan mutu pendidikan
2. Pemenuhan standar yang mengacu pada SPM dan SNP.
3. Pengukuran dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan; dan
4. Memberikan alternative solusi dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan disatuan pendidikan.

⁶⁴ Fattah, Nanang. (2013). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, Hal 8

Badan akreditasi Nasional pendidikan nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan Nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional . Pengetian dari SNP adalah kriteria minimal tentang sisitem pendidikan di seluruh indonesia wilayah indonesia hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kriteria-kriteria adalah sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar Isi Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses Kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Kelulusan.
4. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan Kriteria mengenai kelayakan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan/pengelola pada Satuan Kursus dan Pelatihan.
5. Standar Sarana dan Prasarana Kriteria menegnai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi, media pembelajaran, alat dan bahan ajar, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar Pengelolaan Kriteria mengenai perencanaan , pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satan pendidik, agar tercapai efesisensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar Penilaian Pendidikan Kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar Peserta Didik.

8. Standar Pembiayaan Kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional) di didirikan sebagai bentuk badan evaluasi dalam dunia pendidikan salah satunya dalam pendidikan nonformal, dalam proses evaluasi BAN-PNF memiliki kriteria atau instrumen yang yang telah ditetapkan dalam SNP (Satuan Nasional Pendidikan) jadi lembaga PNF harus memenuhi instrument tersebut untuk mendapatkan akta akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PNF.

Tujuan akreditasi PNF adalah untuk menentukan kelayakan program dalam satuan pendidikan non formal atas dasar Standar Nasional Pendidikan dengan kreteria yang bersifat terbuka. Selain dalam menentukan kelayakan, tujuan akreditasi juga dapat meningkatkan daya saing lembaga seta menarik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang telah terakreditasi.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKREDITASI PENDIDIKAN NON FORMAL

A. Pengertian Akreditasi PNF

Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 disebutkan bahwa Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Sedang pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) dan pasal 15 tersebut dapat dirumuskan bahwa program pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang mencakupi (menurut penjelasan pasal 26 ayat 3) :

1. Program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
2. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
3. Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

4. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.⁶⁵

Satuan pendidikan Non Formal berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI No. 20/2003 satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal sedang menurut pasal 26 ayat 4 yang dimaksud dengan satuan pendidikan nonformal terdiri atas 1) lembaga kursus, 2) lembaga pelatihan, 3) kelompok belajar, 4) pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 5) majelis taklim, serta 6) satuan pendidikan yang sejenis.

Satuan pendidikan kursus dan pelatihan secara khusus disebutkan dalam pasal 26 ayat 5 bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

⁶⁵ Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Jakarta, 2003

Satuan pendidikan anak usia dini secara khusus sebagai tersebut dalam Pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Di perjelas dalam penjelasan pasalnya dikatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Dengan demikian akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan dan program pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

B. Tujuan dan Manfaat Akreditasi PNF

Tujuan akreditasi untuk pemerintah adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PNF di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelakupelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik.

Adapun Manfaat akreditasi antara lain:

1. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional, Nasional, bahkan Internasional;
2. Mendorong Satuan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PNF;
3. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PNF;

Sebagai peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional dan dapat mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.⁶⁶

C. Fungsi Akreditasi PNF

Fungsi akreditasi pada dasarnya memberikan pengakuan akan kualitas/mutu satuan pendidikan melalui proses penilaian kelayakan atas satuan PNF untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. BAN PAUD dan PNF menilai kelayakan tersebut berdasarkan kesesuaiannya dalam pemenuhan delapan (8) SNP.

Selain itu, akreditasi sebagai perlindungan sosial (*social guarantee*) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dan dapat dijadikan sebagai *quality assurance* yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (*Aspek Compliance*) tetapi juga untuk mendorong Lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (*Aspek Performance*).

Dengan aturan akreditasi sebagaimana disebutkan di atas maka pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga evaluasi mandiri yang berwenang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi sifat akuntabilitas publik, obyektif, adil, transparan dan komprehensif atas pelaksanaan akreditasi tersebut. Hal tersebut juga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penilaian kelayakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan ketepatan

⁶⁶ Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018, hal 5

pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi satuan PNF.

D. Prinsip Akreditasi PNF

Dengan aturan akreditasi sebagaimana disebutkan diatas maka pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga evaluasi mandiri yang berwenang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi sifat akuntabilitas publik, obyektif, adil, transparan dan komprehensif atas pelaksanaan akreditasi tersebut. Hal tersebut juga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penilaian kelayakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi satuan PNF.

Akreditasi PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PNF. Mereka wajib mengajukan permohonan, bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PNF wajib memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efisien. Satuan pendidikan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui publik. Masyarakat umum dengan demikian dapat melakukan pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan berdasarkan mutu yang diinginkan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian maka satuan pendidikan PNF akan selalu siap memberikan layanan terbaik disamping siap untuk menerima program-program terkait dengan peningkatan mutu lainnya.

E. Peran Akreditasi dalam Mutu PNF

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 8 (delapan) komponen SNP yaitu, Standar Kompetensi Lulusan SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan. SKL merupakan panduan dalam capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan. Standar Isi merupakan tingkat kompetensi minimal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Proses merupakan panduan dalam melaksanakan proses belajar-mengajar sesuai jenjang pendidikan. SPTK merupakan acuan kualifikasi minimal bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu jenjang pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan sarana dan prasarana yang harus tersedia di suatu jenjang pendidikan untuk mendukung seluruh aktivitas warga suatu satuan pendidikan. Standar Pengelolaan merupakan panduan dalam mengelola dan mengatur seluruh komponen pada suatu jenjang pendidikan. Standar Pembiayaan merupakan panduan mengenai biaya investasi pendidikan, operasional institusi pendidikan, biaya pengembangan, dan biaya personal pada suatu jenjang pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan panduan dalam melaksanakan penilaian oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penilaian pada suatu jenjang pendidikan. Seluruh komponen tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, dengan penambahan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dunia pendidikan tinggi, selain aspek pendidikan.

BAN PAUD dan PNF, BAN S/M, serta BAN PT selaku lembaga independen yang bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan penilaian akreditasi telah merumuskan instrumen penilaian akreditasi suatu lembaga pendidikan sesuai dengan SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem penilaian akreditasi tersebut pada dasarnya telah menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional di

Indonesia bersifat kontinu dan berkesinambungan sesuai kriteria kualitas pendidikan. Masyarakat lebih fokus pada peringkat akreditasi pada jenjang pendidikan tinggi, dibandingkan dengan peringkat akreditasi Sekolah/Madrasah serta lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Masyarakat belum menyadari bahwa setiap satuan/institusi pendidikan di tiap jenjang pendidikan baik formal maupun informal wajib untuk memenuhi seluruh standar mutu sesuai SNP yang berlaku secara nasional yang tercermin dari peringkat akreditasi. Akreditasi memberikan kriteria bagi kualitas tenaga pendidik, pengembangan dan desain kurikulum, proses pembelajaran, pengukuran dan penilaian, penyediaan fasilitas pendukung belajar, peningkatan capaian kemampuan lulusan, serta transparansi, tata kelola, akuntabilitas dalam organisasi dan keuangan (Okoche, 2017). Berdasarkan hal tersebut, akreditasi harus memberikan kelayakan terhadap performa suatu satuan/institusi pendidikan pada tiga komponen penting, yaitu input, process, dan output. Jika kita telaah instrumen akreditasi untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi, maka instrumen tersebut masih menekankan pada keberadaan dokumen. Penekanan pada kualitas proses pembelajaran dalam bobot penilaian akreditasi perlu mendapat perhatian. Proses pembelajaran harus mendukung perkembangan kognitif anak untuk mendukung proses berpikir peserta didik dalam tiga ranah, yakni pengetahuan, pemahaman, dan penalaran⁶⁷. Komponen orientasi 'interaksi manusia' pada suatu sistem pendidikan akan memengaruhi pemberdayaan, komitmen, dan kepuasan komunikasi yang sejalan dengan praktik peningkatan mutu.⁶⁸

⁶⁷ Mahdiannur, M. A., Nur, M., & Supardi, Z. A. I. (2016). Dinamika Pemahaman Konsep Siswa SMP pada Materi Energi Normalized Gain versus Normalized Loss. *Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 5(2), 991-1000. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpps/article/download/510/363>

⁶⁸ Bendermacher, G. W. G., oude Egbrink, M. G. A., Wolfhagen, H. A. P., Leppink, J., & Dolmans, D. H. J. M. (2017). Reinforcing pillars for

Berdasarkan hal tersebut instrumen akreditasi haruslah menitikberatkan pada performa satuan/institusi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Performa tersebut hendaknya fokus pada pengembangan organisasi satuan/institusi pendidikan, evaluasi terhadap inovasi proses pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuan/institusi pendidikan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan oleh satuan/institusi pendidikan, serta pengembangan kurikulum, capaian pembelajaran, dan sistem penilaian yang digunakan oleh satuan/institusi pendidikan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pemenuhan SNP oleh satuan/institusi pendidikan mutlak dilakukan, khususnya oleh tim penjaminan mutu internal suatu satuan/institusi pendidikan. Masyarakat akan berperan penting dalam mendukung dan mengakselerasi pemenuhan seluruh komponen SNP karena masyarakat sangat mendambakan pendidikan yang berkualitas. Peran serta masyarakat juga dapat 'memaksa' pemerintah untuk memberikan dukungan politik dan berbagai kebijakan yang mendukung satuan/institusi pendidikan untuk memenuhi seluruh SNP.

DAFTAR PUSTAKA

- Binti Maunah. *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: PT Sukses Offset, 2009
- Burhannuddin Salam, *Pengantar Pedagogik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Banowati, R. (2014). *Upaya Pengelola Lembaga Kursus Menjahit Dalam Mempersiapkan Lulusannya Memasuki Lapangan Kerja* (Skripsi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, *Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018*, Jakarta, April 2018
- Bendermacher, G. W. G., oude Egbrink, M. G. A., Wolfhagen, H. A. P., Leppink, J., & Dolmans, D. H. J. M. (2017). Reinforcing pillars for quality culture development: a path analytic model. *Studies in Higher Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1393060>
- D. Sudjana. *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori Pendukung serta Asas.*, (Bandung: Falah Production 2001
- Faisal Sanapiah, *Pendidikan Luar Sekolah*. (CV. Usaha Nasional, Surabaya : 2001
- Fatah Syukur NC. *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011
- Gunawan, A. H. *Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro)*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002
- Hermen Harrel Horne. *The Democratic Philosophy of Education*, Mac Millan & Co., New York. 1939
- Herbert Spencer. *Education: Intellectual, Moral and Physical*, William and Nongete. 1906
- <http://ikaput.blogspot.co.id/2012/10/resume-buku-metode-pembelajaran-pls-m.html>
- <https://www.kompasiana.com/hfbalaghoni/54f72e3da333110b7d8b4623/mulai-saja-pendidikan-luar-sekolah#>
- <http://gegige.blogspot.com/2016/12/jenis-jenis-pendidikan-luar-sekolah.html>

- Hasan Basri. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001
- http://my.opera.com./arjuna_kabel/blog/2008/01/04/pendidikan-seumur-hidup
- Hasnida, *Analisis kebutuhan anak usia dini*, (Jakarta Timur, PT. Luxima Metro Media, 2015
- Komar, O. *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006
- Kamil, M. *Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012
- Lihat Abdul Halim el-Muhammady, Januari 1984. *Pendidikan Islam Skop Dan Matlamatnya*, Jurnal Pendidikan, Tahun 1, bil. 1, ABIM, Selangor, hlm. 10 dan lihat juga John Dewey, 1910. *Democracy and Education*, Mac Millan & Co., New York.
- M. Kamil. *Pendidikan Non Formal Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (sebuah Pembelajaran dari Komikan Jepang)*. (Bandung : Alfabeta Bandung, 2009
- M syahran Jailani, *Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*”, (Nadwa Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2, Oktober 2014
- Mustofa Kamil. *Pendidikan Nonformal Pengembangan Melalui PKBM di Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Mahdiannur, M. A., Nur, M., & Supardi, Z. A. I. (2016). Dinamika Pemahaman Konsep Siswa SMP pada Materi Energi Normalized Gain versus Normalized Loss. *Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya*, 5(2), 991- 1000. Retrieved from <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpps/article/download/510/363>
- Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan*. (CV. Remaja Karya, Bandung : 1985

- Oemar Hamalik. *Tekhnologi Pendidikan*. Bandung: Yayasan Partisipasi Pembangunan Indonesia Biro Penulisan Buku. 2000
- Peraturan Mendiknas No. 24 Tahun 2006, Tentang Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SMP/MTs, dan Paket C Setara SMA/MA, hal 15-16
- Redja Mudyahardja. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta:PT Raja Grafindo persada,2001
- Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Jakarta, 2003
- Sudirman. *Ilmu Pendidikan*: Rosda Karya. Bandung. 1991
- Syafaruddin. *Ilmu Pendidikan: Persfektif Baru Rekonstruksi*. Bandung: Cita Pustaka Media. 2005
- Sudjana. *Pendidikan luar sekolah*, (Bandung : Fallah production 2001
- Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, (Jakarta:Bumi Aksara,1999
- Sudjana. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Falah Production. 2004
- Sabri Alisu. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta CV. Pedoman Ilmu Jaya. 1999
- Sumarno dan Yoyon Suryono. *Pembelajaran Kewirausahaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media. 2012
- Tholib Kasan, *Pendidikan Seumur Hidup*, Jakarta, Studio Press 2009
- Tim Dosen FKIP IKIP Malang. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional .1988
- Tholib Hasan, *Pendidikan Seumur Hidup (Dasar-Dasar Kependidikan)*, Jakarta, Studio Press. 2009
- Triyana, Y. F. *Tips Merintis Dan Mengelola Berbagai Lembaga Kursus*. Yogyakarta: Laksana. 2012
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Pasal 13 ayat (1)
- Umberto Sihombing. *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. Jakarta: PD Mahkota. 2000
- UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14
- UU Nomor 20 Tahun 2003 (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) Bab I Pasal 1 Ayat 14.
- Wayan Ardhana. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Malang:FIP IKIP Malang,1986

Yulianai Nurani dan Sujiono, Konsep dasar Pendidikan anak Usia
Dini (Jakarta, PT Indeks, 2009)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP Anak PARET



Nama : **Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I**
Tempat/Tanggal lahir : Pungkat, 09 september 1986
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Parit Nibung Dusun Mekar Jaya
Desa Pungkat Kec. Gaung Kab.
Inhil
Nomor Telephone : 0811-762-666 / 0813-7131-7553
E-mail : irjus9986@gmail.com /
iirjus@yahoo.com
Nama Orang Tua
Bapak : Djasman
Ibu : Salimah
Nama Istri : Nurvawati, Amd.Keb.
Nama Anak : Tartila Putri Indrawan
: Kanaya Putri Indrawan
: Yazid Putra Indrawan

Pendidikan Formal

- Sedang S3 Program Pascasarjana UIN STS Jambi: 2018-Sekarang
- S2 Pogram Pascasarjana UIN SUSKA Riau: Tamat Tahun 2013
- S1 Fakultas Tarbiyah UIN SUSKA Riau: Tamat Tahun 2010
- MAN 039 Tembilahan Kab. Inhil: Tamat Tahun 2004
- SMPN 02 Gaung Kab. Inhil : Tamat Tahun 2001
- SDN 051 Desa Pungkat Kec. Gaung : Tamat Tahun 1998

Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi

- Asesor Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi Riau (2019-Sekarang)
- Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (2016 – 2021)
- Kepala Bidang Seni dan Budaya MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
- Sekjend Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)- Kabupaten Indragiri Hilir (2017-2022)
- Penasehat PAC Pemuda Pancasila Kec. Gaung (2017-2022)
- Dosen Universitas Islam Indragiri (UNISI) 2014 – sekarang
- Direktur Lembaga Riset dan Pemberdayaan Masyarakat (LRPM-INDRAGIRI HILIR) 2014-2019
- Pendamping Desa Pogram Desa Maju Inhil Jaya Kabupaten Indragiri Hilir (2014 - 2016)
- Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Gaung (HPPMKG)-Tembilahan (2014-2017).
- Kabid Penelitian dan Pengembangan Organisasi Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB.HIPPMIH)-Pekanbaru (2007 – 2009)
- Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Inhil (PB HIPMIH)- Pekanbaru (2009 – 2011)
- Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG- Pekanbaru) 2009 - 2011
- Sekjen Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Gaung (IPPMKG-Pekanbaru) 2007 – 2009

KARYA ILMIAH

- ❖ Fiqih Islam Untuk Perguruan Tinggi. Trusmedia Grafika. DIY. 2019
- ❖ Isu-Isu Global Dalam Manajemen Pendidikan. Salim Media Indonesia. Jambi: 2019
- ❖ Proceeding International. Peningkatan Kemampuan Literasi Baru Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PtKi) Di Era Revolusi Industry 4.0 (UIN STS Jambi, Prince Of Songkla University Thailand, University Sultan Idris Malaysia) Thailand: 2019

- ❖ Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (Jurnal Innovatio Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi: 2019)
- ❖ Peran Kepala Sekolah Dalam Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI. 2017)
- ❖ Mengoptimalkan Proses Pembelajaran Pai Melalui Media Lingkungan (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2015).
- ❖ Menjadi Guru Profesional (Trussmedia. Yogyakarta: 2015)
- ❖ Pengantar Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah (Penerbit Deepublish. Cv. Budi Utama. Yogyakarta. 2015)
- ❖ Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Metode E-Learning (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2015).
- ❖ Internastional Conference Proceedings. Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (UUM, UTHM, UNISI) Tembilahan: 2015
- ❖ Proceeding International. Maqomat Al Ahwal Dalam Sufisme (Seminar Internasional, IAIN Imam Bonjol Padang: 2014)
- ❖ Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
- ❖ Model Pembelajaran Nabi Muhammad Saw: (Hiwar , Analogi , Tashbih dan Amthal) (Jurnal Al-Afkar MPI FIAI UNISI.2014)
- ❖ Peta Kerukunan Umat Beragama Dalam Keragaman Agama Di Kabupaten Indragiri Hilir (Dibiayai Oleh Daftar Isian Pelaksana Anggaran (Dipa) Uin Suska Riau, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (LPP) UIN SUSKA Riau: 2013)

CURRICULUM VITAE



Nama : **Hadion Wijoyo,**
S.E.,S.H.,S.Sos.,S.Pd.,M.H.,M.M.,Ak.,CA
.,QWP®

Tempat/Tanggal lahir : Selat Baru, 8 Maret 1976

JenisKelamin : Laki-Laki

Status : Kawin

Perkawinan

Alamat : Jln. Angkasa Gang Angkasa 2 No. 48 P,
Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki,
Kotamadya Pekanbaru-Riau

Nomor Telephone : 085271273675 / 0761-571387

E-mail : dionwijoyo@yahoo.com

Pekerjaan : Dosen Tetap STMIK Dharmapala Riau

Jabatan : Lektor Kepala

Fungsional

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1998	S1	Universitas Riau	Akuntansi
2001	S1	Universitas Lancang Kuning	Ilmu Hukum
2005	S1	Universitas Terbuka	Administrasi Niaga
2019	S1	Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma	Dharma Acarya

		Widya, Tangerang Banten	(Pendidikan Keagamaan Buddha)
2003	S2	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis
2008	S2	Universitas DR. Soetomo (Unitomo) Surabaya	Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran
2019	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah (On Going)	Pendidikan Keagamaan Buddha

II. Kursus/latihan di Dalam dan di Luar Negeri

1. Peace Lecture 21/12/2013 Sertifikat Yogyakarta
2. Wirausaha Muda Bank Indonesia 31/09/2014 Sertifikat Gorontalo
3. Peningkatan Keterampilan Dasar Tehnik Intruksional 07-10/12/2014 Sertifikat Gorontalo
4. Pengembangan Kurikulum 31/10-01/11/2014 Sertifikat Gorontalo
5. Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 12-13/09/2014 Sertifikat Gorontalo
6. Short Course on Religious Diversity 14-26/09/2014 Sertifikat Yogyakarta
7. Applied Approach (AA) 21-24/03/2015 Sertifikat Gorontalo
8. Guru Pamong PPL 8-9/09/2015 Sertifikat Gorontalo
9. Bangun Desa Berwawasan Kependudukan 23-25/10/2016 Sertifikat Bogor
10. Capacity Building Pengelola Kependudukan Di Kabupaten/kota 5-8/08/2016 Sertifikat Surakarta
11. Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah 17/12/2017 Sertifikat Jakarta
12. Training of Trainer bagi Fasilitator Karakter Mahasiswa 28/5/2017 Sertifikat Makasar
13. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley 31/01/2018 Sertifikat Jakarta
14. Academic Writing Workshop and Accepted Paper 20/02/2018 Sertifikat Yogyakarta
15. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Zotero 24/02/2018 Sertifikat Jakarta
16. Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley 24/03/2018 Sertifikat Gorontalo
17. Training of Trainer Tata Kelola Jurnal Elektronik 16-18/03/2018 Sertifikat Yogyakarta

18. Workshop Indexed Journal Consortium International ADRI 02-03/04/2018 Sertifikat Jakarta
19. Workshop ISSN Integrasi Open Journal System dengan Resipatory Ilmiah Nasional 7-8/08/2018 Sertifikat LIPI Jakarta
20. Narasumber Pelatihan Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley Untuk Paper Jurnal Internasional Bereputasi 23-24/02/2019 Sertifikat Gorontalo
21. Pelatihan Refreshment Asesor BAN PAUD PNF Provinsi Gorontalo 10-12 Mei 2019 Sertifikat Gorontalo
22. Pelatihan Penulisan Artikel Untuk Jurnal Internasional Bereputasi 24-25/07/2019 Sertifikat Gorontalo
23. Pelatihan Asesor Kompetensi Penulisan - Penerbitan 2019/IV/BNSP 15-19/09/2019 Sertifikat Jakarta
24. Share Learning in PTU Thailand 15-18 /02/2020 Sertifikat Thailand

III. GUEST LECTUREUR/Visiting Professor

1. Introduction of the Great of Indonesia in International College of Rajamangala University of Technology Krungthep Thailand 29-30 /06/2019 Sertifikat Thailand
2. Visiting Professor and Community Service International College of Rajamangala University of Technology Krungthep Thailand 29-30 /06/2019 Sertifikat Thailand
3. Visiting Professor and Community Service in Patum Thani University Thailand 17-24 /11/2019 Sertifikat Thailand
4 Share Learning in PTU Thailand 15-18 /02/2020 Sertifikat Thailand

IV. PENGALAMAN KERJA Sebagai Pengajar/Fasilitator

1. Dosen tetap Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
2. Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
3. Dosen di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo

4. Dosen Luar Biasa di PPs Universitas Muhammadiyah Gorontalo 2016 SK Gorontalo
5. Dosen Luar Biasa di IAIN Sultan Amai Gorontalo 2016 SK Gorontalo
6. Dosen Luar Biasa di PPs Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung SEKARANG SK Lampung
7. Pelatih Pengelolaan Referensi Dengan Aplikasi Mendeley SEKARANG Sertifikat Jakarta
8. Pelatih PEKERTI-AA SEKARANG SK Gorontalo
9. Trainer Tata Kelola Jurnal Elektronik/RJI SEKARANG Sertifikat Jakarta
10. Assesor BAN PAUDNI SEKARANG SK JAKARTA
11. Dosen Luar Biasa di PPs S3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung SEKARANG SK Lampung
12. Dosen Luar Biasa Pathumthani University SEKARANG SK Thailand

V. Sebagai Pengurus Organisasi/Jabatan

1. Sekretaris Daerah Perkumpulan Ahli dan Dosen RI Sekarang SK DPD Gorontalo
2. Sekretaris Umum Paguyuban Pasundan Gorontalo SEKARANG SK Bandung
3. Sekretaris Umum Ikatan Pascasarjana UNJ 2018 SK Jakarta
4. Sekretaris RJI SEKARANG SK JAKARTA
5. Ketua Bidang IKAPENFI SEKARANG SK Gorontalo
6. IKAPI Gorontalo SEKARANG SK JAKARTA
7. APENMASI Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
8. Ketua Umum Perkumpulan Doktor Indonesia Maju SEKARANG SK JAKARTA
9. Ketua Prodi PPs Pendidikan Masyarakat S2 UNG SEKARANG SK Gorontalo 1
10. Wakil Ketua Relawan Jurnal Indonesia Wilayah Gorontalo SEKARANG SK Gorontalo
11. Dewan Pengawas DPP AP PNFI SEKARANG SK Malang

VI. PRESTASI UNGGUL

A. Pendidikan dan Pembelajaran

1. Manajemen Pendidikan Islam 978-602-9262-58-2 Ideas Publishing Gorontalo 2013 202
2. Sosiologi Pendidikan 978-602-9262-05-6 Ideas Publishing Gorontalo 2015 146
3. Profesi Keguruan 978-602-0889-39-9 Ideas Publishing Gorontalo 2016 170
4. Manajemen Humas Sekolah 978-602-73658-09-6 Media Akademi Pres Yogyakarta 2016 176
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia 978-602-61253-3-0 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 145
6. Kepemimpinan dan Budaya Mutu 978-602-60431-2-2 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 160
7. Manajemen Pendidikan Nonformal 978-602-6802-73-6 WaDe Publishing Ponorogo 2017 266
8. Profesi Keguruan SD 978-602-5541-17-9 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 222
9. Menata Sumber Daya Menuju Good Governance Desa 978-602-5541-13-1 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 175
10. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat pada PNF 978-602-6635-91-4 Ideas Publishing Gorontalo 2018 220
11. Manajemen Profetik: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Alam 978-602-6635-89-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 270
12. Reformasi PT Indonesia 978-602-5878-70-1 Ideas Publishing Gorontalo 2019 180
13. Manajemen Perubahan Era Disruption 978-602-5675-50-1 Ideas Publishing Gorontalo 2019 470
14. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat: dalam rangka pemberdayaan masyarakat 978-602-5878-76-3 Ideas Publishing Gorontalo 2019 210
15. Filsafat Sosial Pendidikan Masyarakat Ideas Publishing Gorontalo 2020
16. Manajemen Kompetensi Pendidikan Masyarakat Zuhir Publishing Yogyakarta 2020

17. Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat dalam Kerangka Pemberdayaan Masyarakat 978-602-587876-3 Ideas Publishing Gorontalo 2020 220
18. Profesi Keguruan SD 978-602-5541-17-9 Zuhir Publishing Yogyakarta 2020
19. Pembelajaran Berbasis Riset di PT Zuhir Publishing Yogyakarta 2020
20. Belajar Merdeka 21 Metodologi Penelitian Ideas Publishing Gorontalo 2020
21. Menjadi Kepala Sekolah 4.0 Zuhir Publishing Yogyakarta 2020

B. Buku Ajar

1. Pengantar Pendidikan 978-602-9262-64-3 Ideas Publishing Gorontalo 2014 158
2. Ilmu pendidikan Islam 978-602-1396-21-6 Ideas Publishing Gorontalo 2014 156
3. Buku Pedoman PPL 978-602-6262-82-7 Elpetiga pres Gorontalo 2015 120
4. Belajar dan Pembelajaran 978-602-0889-14-6 Ideas Publishing Gorontalo 2015 140
5. Buku Ajar Administrasi dan Supervisi PLS 978-602-60431-2-2 FIP Universitas Negeri Gorontalo 2016 90
6. Buku Ajar Antropososiologi 978-602-60431-2-9 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 160
7. Buku Ajar Manajemen Mutu Terpadu 978-602-5541-05-6 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 130
8. Buku Ajar Manajemen dan Strategi Komunikasi Pemasaran 978-602-5541-06-3 Zahir Publishing Yogyakarta 2017 106
9. Buku Ajar Sosio-Antropososiologi 978-602-5541-22-3 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 260
10. Manajemen Kewirausahaan 978-602-5878-09-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 156
11. Manajemen SDM PLS 978-602-5878-11-4 Ideas Publishing Gorontalo 2018 176

12. Perencanaan Program PLS 978-602-5878-12-1 Ideas Publishing Gorontalo 2018 156
 13. Kepemimpinan Dalam PLS 978-602-5878-10-7 Ideas Publishing Gorontalo 2018 256
 14. FILSAFAT ILMU 978-623-234-016-9 Ideas Publishing Gorontalo 2019 152
 15. Pengelolaan Program Penmas 2020
- C. Buku Monograf
1. Manajemen Pendidikan (Orientasi Mutu, Teori dan Implementasi pada Aras Lokal 978-602-9262-44-5 Ideas Publishing Gorontalo 2013 221
 2. Paradigma Baru Pendidikan era Kontemporer 2018
 3. Blended Learning Untuk Penmas 2020 Buku Ilmu Pengetahuan Populer 1 Excellent Learning 978-979-3373-46-6 MQS Publishing Bandung 2011 256
 4. Kearifan Cinta Sang Guru 978-602-1396-71-1 MQS Publishing Bandung 2016 186
 5. Guru Zaman Now 978-602-5541-12-4 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 160
 6. Guru yang Mencetak Orang-orang Sukses 978-602-61253-9-2 Zahir Publishing Yogyakarta 2018 107
 7. Guru sejati menciptakan sorga sorga kecil di kelas dan kehidupan 978-602-5878-49-7 Ideas Publishing Gorontalo 2018 202

Prof. Dr. Abdul Rahmat, S.Sos.I., M.Pd juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi narasumber Nasional dan Internasional , aktif menulis artikel jurnal Nasional tidak terakreditasi/DOAJ, artikel jurnal Nasional Terakreditasi/DOAJ, artikel jurnal Internasional Bereputasi/SCOPUS, artikel jurnal Internasional Bereputasi/THOMSON REUTERS/DOAJ/COPERNICUS, karya tulis disajikan pada seminar Nasional, karya tulis disajikan pada seminar Internasional/Proceeding/Atlantis Press, Editorial Board Journal/Conference/Scientific Committee/Reviewer

